Grobogan
The Spirit of New Paradigm

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
INSPEKTORAT
Jl. Let. Jend. S. Parman Nomor 38 B Telp. (0292) 421190
PURWODADI 58111

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk Tahun Anggaran 2018, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 26 Maret 2019

INSPEKTUR KABUPATEN
GROBOGAN

PUJI RAHARJO, S.H, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19621005 198903 1 005

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rakhmat, barkah, ridho, serta berbagai karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Grobogan Tahun 2018 dapat terselesaikan.

Laporan ini merupakan visualisasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan yang menggambarkan capaian hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 melalui penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021.

Kami menyadari bahwa kinerja dan akuntabilitas kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik, saran dan masukan semua pihak sangat diharapkan, demi perbaikan kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja ke depan yang lebih baik. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama ini.

Laporan kinerja diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil demi peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Grobogan di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami cita-cita bersama segenap unsur masyarakat dan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat terwujud. Semoga upaya kita mendapatkan Rahmad, Hidayah dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwodadi, 28 Maret 2019

BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H, M.M

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yang mana pemerintah daerah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dan perjanjian kinerja yang telah disusun. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2018 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten

Grobogan yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 tujuan dengan dan 21 sasaran, disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari 9 (sembilan) tujuan RPJMD, sebanyak 7 (tujuh) tujuan berkinerja sangat tinggi, 1 (satu) tujuan berkinerja tinggi, dan 1 (satu) tujuan berkinerja cukup yaitu tujuan ke-3 "Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata". Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 105,35% (Kinerja Sangat Tinggi).
2. Dari 21 (dua puluh satu) sasaran RPJMD, sebanyak 14 (empat belas) sasaran berkinerja sangat tinggi, 6 (enam) sasaran berkinerja tinggi dan sebanyak 1 (satu) sasaran berkinerja rendah yaitu sasaran "Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata". Rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 114,59% (Kinerja Sangat Tinggi).
3. Tingkat efisiensi dari sembilan tujuan, diketahui sebanyak delapan kinerja tujuan (88,89%) yang efisien atau hanya satu kinerja tujuan (1,11%) tidak efisien, dan
4. Tingkat efisiensi dari 21 sasaran, diketahui sebanyak 10 kinerja sasaran (47,60%) tidak efisien atau 11 kinerja sasaran (52,50%) yang efisien.

Adapun efisiensi yang berhasil dilakukan mencapai Rp 132.455.739.008,00 (Seratus tiga puluh dua milyar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan rupiah) atau sebesar 11,38% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja ini merupakan bagian dari perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang menjadi tujuan

dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah pada tahun yang akan datang. Pada akhirnya upaya perbaikan kinerja dalam rangka pelayanan publik untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan bisa dicapai. Semoga upaya kita mendapatkan Rahmad, Hidayah dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin

Purwodadi, 28 Maret 219

BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H, M.M

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU ii
KATA PENGANTAR iii
IKHTISAR EKSEKUTIF iv
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Dasar Hukum 2
B. Gambaran Umum Kabupaten Grobogan 3
C. Kewenangan Urusan Pemerintahan 10
D. Perangkat Daerah 11
E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN 18
A. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan 18
B. Tujuan Pembangunan Daerah 20
C. Program Pembangunan Daerah 28
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 38
A. Pengukuran Kinerja 39
B. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan 41
C. Evaluasi dan Anlisis Capaian Kinerja 48
1. Misi 1 48
2. Misi 2 61

3. Misi 3..... 68
4. Misi 4..... 73
5. Misi 5..... 85
6. Misi 6..... 89
7. Misi 7..... 98
8. Misi 8..... 101
9. Misi 9..... 104

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran..... 108
E. Penghargaan yang Diperoleh Kabupaten Grobogan..... 110

BAB IV PENUTUP..... 111
A. Kesimpulan..... 111
B. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP..... 112
C. Keterbatasan Laporan 114

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2018,
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabuapten Grobogan.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah 4
Tabel 1.2 Penggunaan Lahan di Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 5
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Tahun 2014–2018..... 6
Tabel 1.4 Jumlah Pendudu, Rasio Jenis Kelamin, dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2018 7
Tabel 1.5 Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2018 8
Tabel 2.1 Penjabaran Visi, Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2016—2021..... 27
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018..... 33
Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018.....
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja..... 40
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2018..... 41
Tabel 3.3 Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2018 45
Tabel 3.4 Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2018 47
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bina Marga, Sumberdaya Air, Perumahan-Pemukiman, dan Perhubungan 48
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan-Jembatan, Sarana Drainase Perkotaan, dan Jaringan Irigasi 49
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Sasaran Berkurangnya Kawasan Kumuh, Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum dan Sanitasi 54
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan..... 59

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 60
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan 62
Tabel 3.11 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan 65
Tabel 3.12 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan 67
Tabel 3.13 Target dan Realisasi Tujuan Menumbuhkembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat di Sektor UMKM, Industri dan Perdagangan, serta Mewujudkan Daya Saing Pariwisata 69
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Sasaran perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 69
Tabel 3.15 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan dan Pariwisata 71
Tabel 3.16 Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 73
Tabel 3.17 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014—2018 3
Tabel 3.18 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan 74
Tabel 3.19 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 75
Tabel 3.20 APK dan APM Tahun 2018 76
Tabel 3.21 Kondisi Prasarana Gedung Sekolah tahun 2014—2018 77
Tabel 3.22 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Terkendalinya Jumlah Penduduk 78
Tabel 3.23 Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2018 80
Tabel 3.24 Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Balita dan Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Grobogan Tahun 2014—2018 81

Tabel 3.25 Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Minat dan Realisasi Investasi di Berbagai Sektor Usaha 85
Tabel 3.26 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal..... 86
Tabel 3.27 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja 88
Tabel 3.28 Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah..... 89
Tabel 3.29 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kompetensi dan Kedisiplinan ASN 90
Tabel 3.30 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah 92
Tabel 3.31 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah 95
Tabel 3.32 Target dan Realisasi Tujuan Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang 98
Tabel 3.33 Target dan Realisasi Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup..... 99
Tabel 3.34 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kertersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Terkendalinya Alih Fungsi Lahan 100
Tabel 3.35 Target dan Realisasi Tujuan Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kelestarian Budaya Daerah 101
Tabel 3.36 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama..... 102
Tabel 3.37 Target dan Realisasi Sasaran Lestarinya Budaya lokal Masyarakat..... 103
Tabel 3.38 Target dan Realisasi Tujuan Menurunnya Kemiskinan, Kesenjangan antar Wilayah, Kesenjangan antar Kelompok Pendapatan, dan Meningkatnya Kesetaraan Gender 104
Tabel 3.39 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 105

Tabel 3.40 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak 106

Tabel 3.41 Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2018 107

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Grobogan 3

Gambar 1.2 Piramida Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2018 9

Gambar 3.1 Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bupati Grobogan Tahun 2018 47

Gambar 3.2 Diagram Tingkat Pendidikan Penduduk 76

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan perjalanan sejarahnya, Kabupaten Grobogan atau Daerah Grobogan sudah dikenal sejak masa kerajaan Mataram Hindu. Daerah ini menjadi pusat Kerajaan Mataram dengan ibu kotanya di Medhang Kamulan atau Sumedang Purwocarito atau Purwodadi. Pusat kerajaan itu kemudian berpindah ke sekitar kota Prambanan.



Pembahasan terhadap terbentuknya sesuatu Kabupaten (Pemerintah Kabupaten Grobogan) sama halnya dengan pembahasan terhadap terbentuknya sesuatu pemerintahan sesuatu daerah.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1928 (Staatbald, 1928 No. 117) Kabupaten Grobogan mendapatkan tambahan dua distrik (Kawedanan) dari Kabupaten Demak, maka jumlah desa di dalam wilayah Kabupaten Grobogan dengan tambahan dua Kawedanan tersebut yang semula terdiri atas 129 desa menjadi 280 desa sampai sekarang.

Hari Jadi Kabupaten Grobogan jatuh pada hari Senin, 21 Jumadilakir, 1650 atau 4 Maret 1726. Pada saat itu Susuhunan Amangkurat IV mengangkat seorang abdi yang berjasa kepada Sunan, bernama Ng. Wongsodipo menjadi Bupati Monconegari Grobogan dengan nama RT Martopuro.

Menurut data yang ada, Kabupaten Grobogan dengan ibu kota Grobogan pindah ke kota Purwodadi terjadi pada Tahun 1864. Peristiwa ini hanyalah merupakan perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Grobogan. Jadi tidak terjadi perubahan status daerah tersebut.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kakuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950),
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021,
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dan

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

B. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Grbogan

1. Kondisi Geografis

a. Letak Geografi

Kabupaten Grobogan secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 110°15' BT—111°25' BT dan 7° LS—7°30'LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Barat	:	Kabupaten Semarang dan Demak.
Sebelah Utara	:	Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
Sebelah Timur	:	Kabupaten Blora.
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.



Gambar 1.1
Peta Kabupaten Grobogan

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Grobogan ± 1.975,86 km², membentang dari arah barat ke timur sepanjang ± 83 km dan dari utara ke selatan ± 37 km. Secara administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan, sebagaimana dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun/Lingk	Luas Wilayah (km²)
1	Kedungjati	12	76	130,342
2	Karangrayung	19	100	140,595
3	Penawangan	20	71	74,177
4	Toroh	16	118	119,32
5	Geyer	13	102	196,192
6	Pulokulon	13	115	133,644
7	Kradenan	14	79	107,748
8	Gabus	14	87	165,365
9	Ngaringan	12	78	116,72
10	Wirosari	14	86	154,298
11	Tawangharjo	10	58	83,602
12	Grobogan	12	52	104,556
13	Purwodadi	17	104	77,656
14	Brati	9	53	54,891
15	Klambu	9	44	46,562
16	Godong	28	87	86,78
17	Gubug	21	62	71,119
18	Tegowanu	18	54	51,67
19	Tanggungharjo	9	31	60,628
	Jumlah	280	1.457	1.975,865

Sumber : BagianTata Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan.

c. Lahan Pertanian

Penggunaan lahan di Wilayah Kabupaten Grobogan seluas 197.586 Ha terdiri dari lahan pertanian sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian, dengan perincian sebagaimana tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Penggunaan Lahan di Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2018

No	Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah (Ha)		Lahan Pertanian Bukan Sawah (Ha)		Lahan Bukan Pertanian (Ha)	Jumlah (Ha)
		Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Tegal/Kebun	Lainnya		
1	Kedungjati	224,000	555,051	1.849,949	10.023,000	382,000	13.034,000
2	Karangrayung	1.618,757	2.599,072	1.467,171	5.907,000	2.467,000	14.059,000
3	Penawangan	4.217,000	599,784	247,216	1.434,000	920,000	7.418,000
4	Toroh	2.613,070	2.849,629	734,301	3.411,000	2.323,000	11.931,000
5	Geyer	41,000	3.301,036	1.406,964	14.036,000	834,000	19.619,000
6	Pulokulon	-	6.917,328	150,672	3.603,000	2.694,000	13.365,000
7	Kradenan	596,000	4.751,460	11,460	2.871,000	2.567,000	10.774,000
8	Gabus	-	5.725,207	194,793	8.392,000	2.225,000	16.537,000
9	Ngaringan	1.693,000	4.374,438	770,562	2.199,000	2.635,000	11.672,000
10	Wirosari	506,000	5.365,746	1.630,254	5.883,000	2.045,000	15.430,000
11	Tawangharjo	-	3.590,763	865,237	3.028,000	876,000	8.360,000
12	Grobogan	120,000	3.650,785	559,215	4.102,000	2.024,000	10.456,000
13	Purwodadi	3.185,000	1.758,451	281,549	12,000	2.528,000	7.765,000
14	Brati	1.034,830	1.500,321	589,849	1.186,000	1.179,000	5.490,000
15	Klambu	2.415,642	-	311,358	1.153,000	776,000	4.656,000
16	Godong	5.170,000	1.552,379	257,621	181,000	1.518,000	8.679,000
17	Gubug	4.059,130	-	-	1.132,870	1.919,000	7.111,000
18	Tegowanu	3.214,000	879,599	290,401	-	783,000	5.167,000
19	Tanggungharjo	709,000	1.369,154	98,846	2.853,000	1.033,000	6.063,000
	Jumlah	31.416,429	51.340,203	11.694,498	71.406,870	31.728,000	197.586,000

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

d. Keadaan Alam

Kabupaten Grobogan di bagian utara dan selatan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Secara topografi kondisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1) Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut rata-rata (*mean sea level*) dengan kemiringan antara 0—8°. Dataran ini, sebagian besar berada di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Kecamatan Wirosari bagian selatan.

2) Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50—100 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara 8—15^{o} dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara, seperti Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara, dan Wirosari sebelah utara.
3) Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100—500 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan tanah di atas 15^{o}, meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2018 tercatat sebesar 1.459.780 jiwa, mengalami pertumbuhan penduduk 0,69% atau bertambah 9.989 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2017. Data jumlah penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Tahun 2014–2018

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perubahan	Pertumbuhan (%)
		Laki-laki	Perempuan			
1	2014	713.077	699.248	1.412.325	9.565	0,68
2	2015	718.225	713.310	1.431.535	19.210	1,36
3	2016	727.127	717.075	1.444.202	12.667	0,89
4	2017	729.738	720.053	1.449.791	5.589	0,39
5	2018	732.653	727.127	1.459.780	9.989	0,69

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

b. Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

Jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 berdasarkan jenis kelamin, lebih banyak berjenis

kelamin laki-laki dari perempuan. Komposisi penduduk laki-laki sebanyak 732.653 jiwa dan perempuan sebanyak 727.127 jiwa, maka rasio jenis kelamin penduduk mencapai 101%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.

Berdasarkan jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah paling banyak jumlah penduduknya, yaitu mencapai 139.296 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 38.444 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk tercatat sebesar 739 jiwa/km^2, dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.794 jiwa/km^2 dan kecamatan kepadatan terendah di Kecamatan Geyer yaitu sebesar 342 jiwa/km^2.

Untuk mengetahui jumlah penduduk, rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk per kecamatan, dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Pendudu, Rasio Jenis Kelamin, dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan Penduduk
		L	P	Jumlah			
1	Kedungjati	22.403	22.397	44.800	100	130,342	344
2	Karangrayung	50.376	49.746	100.122	101	140,595	712
3	Penawangan	32.719	32.702	65.421	100	74,177	882
4	Toroh	58.812	59.136	117.948	99	119,320	989
5	Geyer	33.680	33.394	67.074	101	196,192	342
6	Pulokulon	55.269	54.177	109.446	102	133,644	819
7	Kradenan	41.547	41.160	82.707	101	107,748	768
8	Gabus	37.238	36.853	74.091	101	165,365	448
9	Ngaringan	35.591	34.418	70.009	103	116,720	600
10	Wirosari	46.775	46.345	93.120	101	154,298	604
11	Tawangharjo	29.542	28.888	58.430	102	83,602	699

No.	Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan Penduduk
		L	P	Jumlah			
12	Grobogan	39.188	38.605	77.793	101	104,556	744
13	Purwodadi	69.417	69.879	139.296	99	77,656	1.794
14	Brati	25.330	24.953	50.283	101	54,891	916
15	Klambu	19.429	19.015	38.444	102	46,562	826
16	Godong	43.747	43.966	87.713	99	86,780	1.011
17	Gubug	42.289	42.191	84.480	100	71,119	1.188
18	Tegowanu	28.281	28.166	56.447	100	51,670	1.092
19	Tanggungharjo	21.020	21.136	42.156	99	60,628	695
	Jumlah	732.653	727.127	1.459.780	101	1.975,865	739

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan.

c. Struktur Usia dan Angka Ketergantungan Penduduk

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0—14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (disebut usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15—64 tahun (usia produktif).

Berdasarkan struktur usia, penduduk Kabupaten Grobogan dapat dikelompokkan seperti dalam tabel 1.5 berikut:

Tabel 1. 5
Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2018

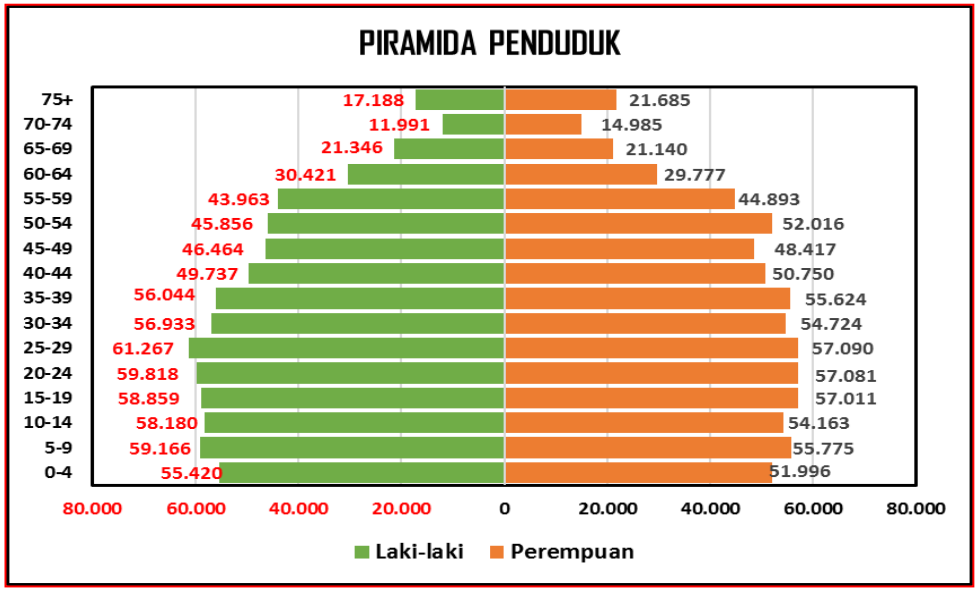
No	Kelompok umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	55.420	51.996	107.416
2	5-9	59.166	55.775	114.941
3	10-14	58.180	54.163	112.343
4	15-19	58.859	57.011	115.870
5	20-24	59.818	57.081	116.899
6	25-29	61.267	57.090	118.357
7	30-34	56.933	54.724	111.657
8	35-39	56.044	55.624	111.668
9	40-44	49.737	50.750	100.487
10	45-49	46.464	48.417	94.881

No	Kelompok umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
11	50-54	45.856	52.016	97.872
12	55-59	43.963	44.893	88.856
13	60-64	30.421	29.777	60.198
14	65-69	21.346	21.140	42.486
15	70-74	11.991	14.985	26.976
16	≥ 75	17.188	21.685	38.873
Jumlah		732.653	727.127	1.459.780

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan.

Pada tahun 2018, sebagian besar struktur penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15—64 tahun), yang mencapai 1.016.745 jiwa, dan kelompok usia non produktif (usia 0—14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 443.035 jiwa, sehingga rasio ketergantungan sebesar 44%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 44 orang yang non produktif.

Berdasarkan data tabel 1.5 di atas dapat disusun piramida penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana tampak dalam Gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2
Piramida Penduduk Tahun 2018

C. Kewenagan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunanya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh kabupaten/kota. Nomenklatur urusan pemerintahan konkuren meliputi:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
   a. pendidikan;
   b. kesehatan;
   c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
   d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
   e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
   f. sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
   a. tenaga kerja;
   b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   c. pangan;
   d. pertanahan;
   e. lingkungan hidup;
   f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
   h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   i. perhubungan;
   j. komunikasi dan informatika;
   k. koperasi, usaha kecil dan menengah;

l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olahraga;
n. statistik;
o. persandian;
p. perpustakaan; dan
q. kearsipan.

3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
   a. kelautan dan perikanan;
   b. pariwisata;
   c. pertanian;
   d. kehutanan;
   e. energi dan sumber daya mineral;
   f. perdagangan;
   g. perindustrian; dan
   h. transmigrasi.

D. Perangkat Daerah

Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Adapun susunan perangkat daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe A;
3. Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
   a. Dinas Pendidikan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

b. Dinas Kesehatan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
e. Dinas Sosial Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
g. Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan;
h. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan;
i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
k. Dinas Perhubungan Tipe C, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

l. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
o. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahanbidang pariwisata;
p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
q. Dinas Pertanian Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
r. Dinas Perternakan dan Perikanan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub Urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
t. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; dan

u. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

5. Badan Daerah, terdiri atas :
   a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
   b. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah; dan
   c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.

Selain perangkat daerah tesebut di atas, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari Kecamatan tipe A yaitu:

1. Kecamatan Purwodadi,
2. Kecamatan Toroh,
3. Kecamatan Geyer,
4. Kecamatan Grobogan,
5. Kecamatan Brati,
6. Kecamatan Klambu,
7. Kecamatan Wirosari,
8. Kecamatan Tawangharjo,
9. Kecamatan Ngaringan,
10. Kecamatan Kradenan,
11. Kecamatan Pulokulon,
12. Kecamatan Gabus,

13. Kecamatan Godong,
14. Kecamatan Penawangan,
15. Kecamatan Karangrayung,
16. Kecamatan Gubug,
17. Kecamatan Kedungjati,
18. Kecamatan Tegowanu, dan
19. Kecamatan Tanggungharjo.

Sedangkan dalam wilayah kecamatan dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

E. Isu-isu Strategis (*Strategic Issued*)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan gambaran umum yang telah diuraikan di atas, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Grobogan diantaranya sebagai berikut:

1. Masih rendahnya partisipasi dalam penyelenggaraan PAUD oleh masyarakat,
2. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar,
3. Masih rendahnya ketersediaan sarana ruang kelas pada pendidikan dasar, terutama pada satuan pendidikan SD/MI,
4. Masih tingginya angka kematian Ibu dan angka kematian bayi,

5. Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan ada kecenderungan meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tidak menular,
6. Masih kurangnya mutu pelayanan baik sarana, prasarana maupun sumber daya kesehatan,
7. Masih tingginya kondisi jalan rusak di Kabupaten Grobogan,
8. Masih rendahnya pelayanan sistem drainase perkotaan,
9. Belum optimalnya pemenuhan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum,
10. Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memerlukan penanganan dan kurangnya pemberdayaan PMKS,
11. Masih rendahnya penempatan angkatan kerja,
12. Meningkatnya kuantitas sampah domestik terutama sampah plastik, tidak sebanding dengan kapasitas daya tampung sarana pengelolaan dan pengolahan sampah,
13. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R
14. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
15. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan berupa marka, rambu dan *guardrill*.
16. Belum optimalnya penyediaan jaringan komunikasi antar Perangkat Daerah (PD) dan pengembangan Website pemerintah Kabupaten Grobogan,
17. Belum optimalnya pemberdayaan sumberdaya informasi dan komunikasi, berkaitan dengan kemampuan PD dalam melakkan *up date* informasi yang dimuat dalam *website*,
18. Kurangnya Sarana dan Prasarana obyek wisata,
19. Belum optimalnya peningkatan produksi pertanian,

20. Belum optimalnya ketersediaan perencanaan pembangunan yang menjawab permasalahan sektoral pada pembangunan daerah.

Selain isu strategis sesuai kewenangan urusan pemerintah, masih ditemukan permasalahan strategis yang menjadi kewenangan urusan penunjang pemerintahan, diantaranya:

1. Belum optimalnya kesesuaian perencanaan antar perangkat daerah,
2. Belum optimalnya peningkatan kapasitas apartur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan,
3. Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan
4. Belum optimalnya penguatan kabupaten dan OPD yang mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan SAKIP telah menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi Kab. Grobogan
B. Tujuan Pembangunan
C. Program Pembangunan
D. Perjanjian Kinerja

A. Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021

Visi Kabupaten Grobogan pada periode lima tahun ke depan (tahun 2016–2021) adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh"

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase, yaitu ***Masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara utuh*** dan ***Masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara menyeluruh***. Penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah:

Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril

maupun materiil. Artinya masyarakat Kabupaten Grobogan dapat secara utuh unsur yang ada dalam arti sejahtera terpenuhi semua, baik itu sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki usia harapan hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjalani kehidupannya, terhindar dari ancaman kemanan dan ketertiban lingkungan.

Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten. Ditandai dengan menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan menurunnya kesenjangan antar wilayah.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan Misi yang akan memberikan kejelasan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Adapun 9 (sembilan) misi pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber daya air
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, kepemudaan, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningatan penyerapan tenaga kerja
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola

pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik

7. Meningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

B. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu hingga lima tahun sesuai periode RPJMD, yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Adapun sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.
2. Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.
3. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.
5. Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.
6. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
7. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan

ruang

8. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.
9. Menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.

Penjabaran Visi, Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2016—2021 lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penjabaran Visi, Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2016—2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1:											
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber daya air	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	Persentase infrastruktur Kondisi Baik	Persentase pembangunan infrastuktur dikategorikan baik baik setelah dinilai melalui indikator perbaikan jalan, sumber daya air, perumahan, pemukiman dan perhubungan.	% rata-rata kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, wilayah kumuh, sanitasi, air minum, irigasi, dan saran perhubungan)	%	70,77	73,96	76,89	79,91	82,70	85,55
Misi 2:											
Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan	2. Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Indikator untuk mengetahui produktivitas pertanian dan ketahanan pangan yang dapat dilihat berdasarkan atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konstan, PDRB dimasukkan sebagai jumlah nilai tambah yang yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang ada dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian tahun n dikurangi jumlah kontribusi PDRB tahun n-1	%	2,34	2,49	2,64	2,79	2,94	3,09
Misi 3:											

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata	3. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	Pertumbuhan Ekonomi	Proses kenaikan output per kapita yang merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah	Produk domestik bruto tahun n dibagi produk domestik bruto tahun n-1 kali 100%	%	6,11	6,26	6,41	6,56	6,71	6,86
		Laju Inflasi	Suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarkat yang meningkat dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi	Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun n dikurangi IHK tahun n-1 dibagi IHK tahun n kali 100%.	%	3,21	3,11	3,01	2,91	2,81	2,71
Misi 4:											
Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat keolahragaan, kepemudaan, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya	4. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut	$IPM = \frac{1}{3}\left[X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}\right]$ Dimana: $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $^2/_3$ (indeks melek huruf)+$^1/_3$ (indeks rata-rata lama	Indeks	68,36	68,67	68,98	69,29	69,60	69,91

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
			mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan	$X_{(3)}$: sekolah) Indeks standar hidup layak							
Misi 5:											
Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningatan penyerapan tenaga kerja	5. Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Pertumbuhan investasi penanaman modal asing dan dalam negeri dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan PDRB, pertumbuhan investasi memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja	Jumlah nilai investasi pada tahun n dikurangi jumlah nilai investasi pada tahun n-1 dibagi jumlah nilai investasi pada tahun n-1.	%	5,10	5,20	5,40	5,50	5,60	5,7
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Banyaknya pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja atau indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran.	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100%	%	4,13	4,07	4,04	4,01	3,98	3,95
Misi 6:											
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik	6. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh	Pengukuran sesuai ketentuan Permen PAN dan RB No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2014.	Predikat	C	C	C	C	CC	CC

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi								
Misi 7:											
Peningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang	7. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu	Perhitungan IKLH adalah 100% dengan Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30% dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40%.	Indeks	70,00	73,00	76,00	79,00	82,00	85,00
Misi 8:											
Peningkatan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat	8. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	Tingkat kelestarian budaya lokal	Nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu	Jumlah seni budaya lokal Kabupaten Grobogan yang masih eksis untuk dipertunjukkan dibagi jumlah seluruh budaya lokal Kabupaten Grobogan yang ada dikalikan 100%	%	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
Misi 9:											
Peningkatan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan	9. Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok	Persentase Penduduk Miskin	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah seluruh penduduk kali 100%.	%	13,18	12,68	12,18	11,68	11,18	10,68
		Indeks Pembangunan	Digunakan untuk mengukur pencapaian	$IPG = 1/3\left[(X_{sde\,(1)} + X_{sde\,(2)} + I_{inc-dis}\right)$	Indeks	85,84	86,05	86,25	86,45	86,65	86,85

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
anak dan penanggulangan kemiskinan	pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	Gender	dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan	Xede(1)= Xede untuk harapan hidup Xede(2)= Xede untuk harapan pendidikan IInc-dis = indeks distribusi pendapatan Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Semakin tinggi nilai IPG, maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.							
		Indeks Gini	Ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan	GR : Koefisien Gini (Gini Ratio) Pi: frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i Fi: frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i Fi-1: frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)	Indeks	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27
		Nilai indeks Williamson	Ukuran ketimpangan pendapatan untuk menganalisi seberapa	$IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f_i \, l \, n}}{Y}$	Indeks	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
			besar kesenjangan antar daerah/wilayah	Dimana: Untuk kabupaten/kota: Yi = PDRB perkapita di kecamatan I Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota Fi = jumlah penduduk di kecamatan i n = jumlah penduduk di kab/kota						

B. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran. Dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah menetapkan program pembangunan sesuai misi pembangunan yang terdiri dari:

1. Program Pembangunan Misi Pertama

Dalam rangka perwujudan misi pertama yaitu *"Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air"*, program pembangunan yang mendukung misi pertama adalah:

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,
b. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
c. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong,
d. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya,
e. Program Lingkungan Sehat Perumahan,
f. Program Pengembangan Perumahan,
g. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku,
h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah,
i. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ,
j. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor, dan
k. Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan

2. Program Pembangunan Misi Kedua

Dalam rangka perwujudan misi kedua yaitu *"Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan"*, program pembangunan yang mendukung misi kedua adalah:

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan),
b. Program Peningkatan Produksi Perkebunan,
c. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan,
d. Program Pengembangan Perikanan Budidaya, dan
e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

3. Program Pembangunan Misi Ketiga

Dalam rangka perwujudan misi ketiga yaitu "*Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata*", program pembangunan yang mendukung misi ketiga adalah:

a. Program peningkatan Kapasitas dan Penggunaan Iptek dalam Sistem Produksi,
b. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku dan Kemampuan Teknologi Industri,
c. Program Penataan Struktur Industri,
d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah,
e. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif,
f. Progam Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM,
g. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi,
h. Program Pembinaan Perdagangan Kaki Lima dan Asongan,
i. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor,
j. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dan
k. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

4. Program Pembangunan Misi Keempat

Dalam rangka perwujudan misi keempat yaitu *"Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya"*, program pembangunan yang mendukung misi keempat adalah:

a. Program PAUD,
b. Program Pendidikan Non Formal,
c. Program Pendidikan Dasar 9 Tahun,
d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan,
f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan,
g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat,
h. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular,
i. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,
j. Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata,
k. Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya,
l. Program Keluarga Berencana, dan
m. Program Pelayanan Kontrasepsi.

5. Program Pembangunan Misi Kelima

Dalam rangka perwujudan misi kelima yaitu *"Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja"*, program pembangunan yang mendukung misi kelima adalah:

a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi,
b. Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
c. Program peningkatan Kesempatan Kerja,
d. Program Perlindungan Dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan,
e. Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dan
f. Program Transmigrasi.

6. Program Pembangunan Misi Keenam

Dalam rangka perwujudan misi keenam yaitu *"Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik"*, program pembangunan yang mendukung misi keenam adalah:

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur,
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur,
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah,
e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,
f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH,
g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan
h. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

7. Program Pembangunan Misi Ketujuh

Dalam rangka perwujudan misi ketujuh *yaitu "Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang"*, program pembangunan yang mendukung misi ketujuh adalah:

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dan
b. Program Pemanfaatan Ruang,

8. Program Pembangunan Misi Kedelapan

Dalam rangka perwujudan misi kedelapan yaitu "*Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat*", program pembangunan yang mendukung misi kedelapan adalah:

a. Program Kerukunan Umat Beragama,
b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dan
c. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

9. Program Pembangunan Misi Kesembilan

Dalam rangka perwujudan misi kesembilan yaitu "*Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan*", program pembangunan yang mendukung misi kesembilan adalah:

a. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,
b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dan
c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2018 disusun berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016—2021, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Grobogan, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan beserta Perubahannya Tahun 2018. Perjanjian Kinerja (Tujuan dan

Sasaran) Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 diuraikan dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I.	*Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.*	*Persentase infrastruktur Kondisi Baik*	*76,89%*
1.	Meningkatnya kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	1. Persentase jalan-jembatan kondisi baik	60,01%
		2. Cakupan drainase kondisi baik	61,00%
		3. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	83,70%
2.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	4. Persentase kawasan kumuh	0,027%
		5. Persentase cakupan pelayanan sanitasi	74,50%
		6. Persentase cakupan pelayanan air minum	80,10%
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	7. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	93,00%
II.	*Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.*	*Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian*	*2,64%*
4.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	8. Pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura	16,67%
		9. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	3%/th
		10. Pertumbuhan produksi peternakan	10,31%
5.	Meningkatnya produksi perikanan	11. Produksi perikanan budidaya	2.206.852 kg
6.	Meningkatnya ketahanan pangan	12. Skor PPH	87,00
III.	*Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan*	*Pertumbuhan Ekonomi*	*6,41%*
		Laju Inflasi	*3,01%*

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.		
7.	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	13. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	3,30%
		14. Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan	91,00%
8.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	15. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	22,35%
		16. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	0,84%
IV.	*Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia*	*Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*	*68,98*
9.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	17. Rata-rata lama sekolah	6,95 tahun
		18. Angka harapan lama sekolah	12,54 tahun
10.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	19. Angka usia harapan hidup	74,20 tahun
		20. Laju pertumbuhan penduduk	0,53%
V.	*Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.*	*Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN*	*5,40%*
		Tingkat Pengangguran Terbuka	*4,04%*
11.	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	21. Nilai investasi PMA	1.250 ribu US$
		22. Nilai investasi PMDN	389.486 Juta Rp
12.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	23. Persentase Penempatan Tenaga Kerja	70,98%
VI.	*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah*	*Indeks Reformasi Birokrasi*	*C*
13.	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	24. Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	80,00%
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	25. Nilai SAKIP	CC
		26. Opini laporan keuangan BPK	WTP
15.	Meningkatnya kepuasan masyarkat terhadap pelayanan publik Pemda	27. Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat (SKM)	76,00
		28. Skor PeGi (Pemeringkatan E *Government*)	2,40
VII.	*Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang*	*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	*76,00*

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	29. Indeks Kualitas Air	78,74
		30. Indeks Kualitas Udara	86,18
		31. Indeks Tutupan Lahan	62,84
17.	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	32. Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	93,72
VIII.	*Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.*	*Tingkat Kelestarian Budaya Lokal*	*55,00%*
18.	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	33. Tingkat kerukunan antar umat beragama	100,00%
19.	Lestarinya budaya lokal masyarakat	34. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	55,00%
IX.	*Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.*	*Persentase Penduduk Miskin*	*12,18%*
		Indeks Pembangunan Gender	*86,25*
		Indeks Gini	*0,29*
		Indeks Williamson	*0,17*
20.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	35. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	66,78%
21.	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	36. Indeks Pemberdayaan Gender	58,21
		37. Skor Kabupaten layak anak	501-600

D. Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menyusun Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018. Perubahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuasi ketentuan Peraturan tersebut mensyaratkan tujuan pembangunan daerah beserta indikator kinerjanya. Adapun

penetapan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2018 sebagaimana dalam tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
I.	*Persentase infrastruktur Kondisi Baik*	*%*	*76,89*
1.	Persentase jalan-jembatan kondisi baik	%	60,01
2.	Cakupan drainase kondisi baik	%	61,00
3.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	83,70
4.	Persentase kawasan kumuh	%	0,027
5.	Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	74,50
6.	Persentase cakupan pelayanan air minum	%	80,10
7.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	93,00
II.	*Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian*	*%*	*2,64*
8.	Pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura	%	16,67
9.	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/tahun	3,00
10.	Pertumbuhan produksi peternakan	%	10,31
11.	Produksi perikanan budidaya	Kg	2.206.852
12.	Skor PPH	Skor	87,00
III.	*a. Pertumbuhan Ekonomi*	*%*	*5,40*
	b. Laju Inflasi	*%*	*4,04*
13.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,30
14.	Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/keuangan	%	91,00
15.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	22,35
16.	Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,84
IV.	*Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*	*Indeks*	*68,98*
17.	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	6,95
18.	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,54
19.	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,20
20.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,53
V.	*Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN*	*%*	*5,40*
	Tingkat Pengangguran Terbuka	*%*	*4,04*
21.	Nilai investasi PMA	ribu US$	1.250
22.	Nilai investasi PMDN	Juta Rp	389.486
23.	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	70,98
VI.	*Indeks Reformasi Birokrasi*	*Predikat*	*C*
24.	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	80,00
25.	Nilai SAKIP	Peringkat	CC
26.	Opini laporan keuangan BPK	Peringkat	WTP
27.	Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat (SKM)	%	76,00

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
28.	Skor PeGi (Pemeringkatan E *Government*)	Skor	2,40
VII.	*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	*Indeks*	*76,00*
29.	Indeks Kualitas Air	Indeks	78,74
30.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,18
31.	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	62,84
32.	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	93,72
VIII.	*Tingkat Kelestarian Budaya Lokal*	*%*	*55,00*
33.	Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100,00
34.	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	55,00
IX.	*a. Persentase Penduduk Miskin*	*%*	*12,18*
	b. Indeks Pembangunan Gender	*Indeks*	*86,25*
	c. Indeks Gini	*Indeks*	*0,29*
	d. Indeks Williamson	*Indeks*	*0,17*
35.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	66,78
36.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	58,21
37.	Skor Kabupaten layak anak	Skor	501-600

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 atas target rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan kinerja (LKj). Penetapan rencana kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Bupati Grobogan pada awal tahun 2018.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang mencakup perhitungan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2018, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018. Perubahan dilakukan karena telah diubahnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Grobogan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018. Hal ini sebagai tindak lanjut dilaksanakannya perubahan prioritas atau asumsi dengan dirumuskannya tujuan/indikator tujuan dan sasaran/indikator sasaran yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Bab ini disajikan uraian tentang pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja tujuan dan sasaran. Analisis pencapaian kinerja

menjelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, capaian kinerja pemerintah daerah provinsi dan pemerintah. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi terkait yang telah dicapai.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana Kerja Pembanguan Daerah (RKPD) tahun 2018, serta yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Penghitungan pencapaian rencana dan tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Rencana}-(\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan, termasuk merumuskan sebab-sebab

tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan serta mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja tujuan dan sasaran.

Sesuai realisasi capaian kinerja, dilakukan pengkategorian capaian kinerja, berdasarkan skala pengukuran kinerja seperti tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No.	Persentase Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	>95	Kinerja Sangat Tinggi
2.	80 s.d <95	Kinerja Tinggi
3.	65 s.d <80	Kinerja Cukup
4.	50 s.d <65	Kinerja Rendah
5.	<50	Kinerja Sangat Rendah

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dilaksanakan dengan cara membandingkan persentase realisasi anggaran (persentase penyerapan anggaran) tiap-tiap sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Analisis efisiensi dijelaskan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Efisien**, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, dan
2. **Tidak efisien**, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

B. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grbogan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Grobogan Tahun 2018 sesuai Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan yang terdiri dari Indikator Tujuan sebanyak 14 indikator dan Indikator Sasaran sebanyak 37 indikator. Adapun capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 disajikan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2018

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	Persentase infrastruktur Kondisi Baik	%	76,89	78,02	101,47	85,55	91,20
1.	Meningkatnya kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	1. Persentase jalan-jembatan kondisi baik	%	60,01	72,11	120,16	84,51	85,33
		2. Cakupan drainase kondisi baik	%	61,00	65,00	106,56	64,00	101,56
		3. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	83,70	84,03	100,39	85,00	98,86
2.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	4. Persentase kawasan kumuh	%	0,027	0,026	103,70	0,00	0,00
		5. Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	74,50	68,91	92,50	85,00	81,07
		6. Persentase cakupan pelayanan air minum	%	80,10	78,08	97,48	85,17	91,68

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	7. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	93,00	78,00	83,87	95,00	82,11
II.	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	2,64	2,95*)	111,74	3,09	95,47
4.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	8. Pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura	%	16,67	30,56	183,32	23,51	129,99
		9. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/tahun	3,00	2,95	98,33	3,00	98,33
		10. Pertumbuhan produksi peternakan	%	10,31	10,47	101,55	11,11	94,24
5.	Meningkatnya produksi perikanan	11. Produksi perikanan budidaya	Kg/tahun	2.206.852	2.330.980	105,62	2.587.662	90,08
6.	Meningkatnya ketahanan pangan	12. Skor PPH	Skor	87,00	84,40	97,01	90,00	93,78
III.	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,41	5,65*)	88,14	6,86	82,36
		Laju Inflasi	%	3,01	4,05*)	65,45	2,71	50,55
7.	Meningkatnya perkembangan	13. Kontribusi sektor Industri terhadap	%	3,30	15,00	454,55	3,46	433,53

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
	Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	PDRB 14. Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan	%	91,00	100,00	109,89	94,00	106,38
8.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	15. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	22,35	19,72	88,23	23,65	83,38
		16. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,84	0,16	19,05	0,93	17,20
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,98	68,87*)	99,84	69,91	98,51
9.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	17. Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	6,95	6,66*)	95,83	7,04	94,60
		18. Angka Harapan lama sekolah	Tahun	12,54	12,17*)	97,05	12,82	94,93
10.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	19. Angka usia harapan hidup	Tahun	74,20	74,46*)	100,35	74,44	100,03
		20. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,53	0,67	73,58	0,50	66,00
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	%	5,40	366,21	6.781,67	5,7	6.424,74
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,04	3,02	125,25	3,95	123,54
11.	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	21. Nilai investasi PMA	ribu US$	1.250	2.140	171,20	1.250	171,20
		22. Nilai investasi PMDN	Juta Rp	389.486	928.540	238,40	389.486	238,40
12.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	23. Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	70,98	62,25	87,70	72,48	85,89
VI.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	C	100,00	B	33,33

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
	daerah							
13.	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	24. Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	80,00	68,92	86,15	80,00	86,15
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	25. Nilai SAKIP	Peringkat	CC	CC	114,86	B	95,72
		26. Opini laporan keuangan BPK	Peringkat	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
15.	Meningkatnya kepuasan masyarkat terhadap pelayanan publik Pemda	27. Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat (SKM)	%	76,00	75,06	98,76	79,00	95,01
		28. Skor PEGI (Pemeringkatan E Government)	Skor	2,40	2,80	116,67	3,90	71,79
VII.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,00	74,29	97,75	85,00	87,40
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	29. Indeks Kualitas Air	Indeks	78,74	78,75	100,01	81,22	96,96
		30. Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,18	85,68	99,42	88,90	96,38
		31. Indeks Tutupan Lahan	Indeks	62,84	62,40	99,30	64,88	96,18
17.	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	32. Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	93,72	91,50	97,63	96,12	95,19
VIII.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	Tingkat Kelestarian Budaya Lokal	%	55,00	62,00	112,73	70,00	88,57
18.	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan	33. Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
	antar umat beragama							
19.	Lestarinya budaya lokal masyarakat	34. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	55,00	62,00	112,73	70,00	88,57
IX.	Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	Persentase Penduduk Miskin	%	12,18	12,31	98,93	10,68	84,74
		Indeks Pembangunan Gender	indeks	86,25	85,69	99,35	86,85	98,66
		Indeks Gini	Indeks	0,29	0,35*)	79,31	0,27	70,37
		Indeks Williamson	Indeks	0,17	0,83*)	-288,24	0,15	-3.53
20.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	35. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	66,78	59,27	88,75	78,57	75,44
21.	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	36. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	58,21	56,01	96,22	58,93	95,04
		37. Skor Kabupaten layak anak	Skor	501-600	687	137,13	801-900	85,77

*) Sumber : Data BPS Tahun 2017

Berdasarkan perhitungan persentase capaian kinerja, selanjutnya kinerja sasaran dikategorikan sesuai skala pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan
Tahun 2018

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas jalan- jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	3	109,03	Sangat Tinggi
2.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	3	95,43	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	1	83,87	Tinggi

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
4.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	3	183,32	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya produksi perikanan	1	105,52	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya ketahanan pangan	1	96,55	Sangat Tinggi
7.	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	2	282,22	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	2	53,64	Rendah
9.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	2	96,44	Sangat Tinggi
10.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	2	86,97	Tinggi
11.	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	2	204,80	Sangat Tinggi
12.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1	87,70	Tinggi
13.	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	1	86,15	Tinggi
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	2	107,43	Sangat Tinggi
15.	Meningkatnya kepuasan masyarkat terhadap pelayanan publik Pemda	2	91,48	Tinggi
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3	99,58	Sangat Tinggi
17.	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	1	97,63	Sangat Tinggi
18.	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	1	100,00	Sangat Tinggi
19.	Lestarinya budaya lokal masyarakat	1	112,73	Sangat Tinggi
20.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	1	88,75	Tinggi
21.	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	1	137,13	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja per indikator sasaran		37	65,04	
Rata-rata capaian kinerja sasaran		21	114,59%	

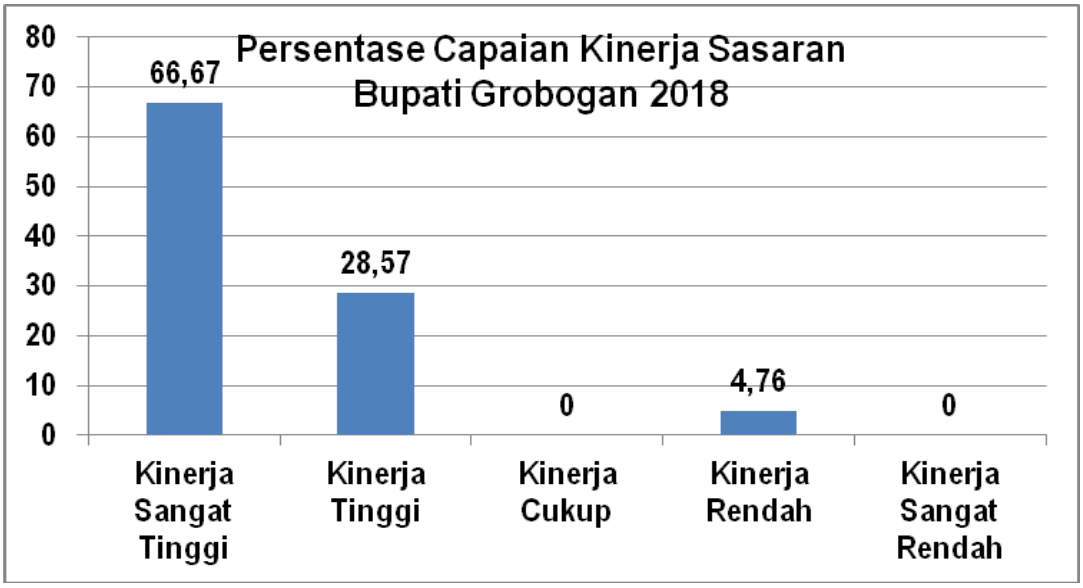
Pencapaian kinerja dari 21 (dua puluh satu) indikator sasaran tersebut di atas, dikelompokkan sesuai kategori kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan
Tahun 2018

No.	Kategori Kinerja	Jumlah Sasaran	% Kinerja
1.	Kinerja Sangat Tinggi	14	66,67
2.	Kinerja Tinggi	6	28,57
3.	Kinerja Cukup	-	-
4.	Kinerja Rendah	1	4,76
5.	Kinerja Sangat Rendah	-	-
	Jumlah	21	100,00

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Grobogan tahun 2018 yang berjumlah 21 sasaran yang terdiri dari 37 indikator menunjukkan kinerja sangat tinggi sebanyak 14 sasaran (66,67%), kinerja tinggi sebanyak 6 sasaran (28,57%) dan ditemukan 1 sasaran (4,76%) dengan kinerja yang rendah yaitu sektor perdagangan dan pariwisata yang digambarkan pada grafik 3.1 berikut :

Grafik 3.1
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bupati Grobogan
Tahun 2018



C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini dilaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per tujuan dan sasaran strategis masing-masing Misi sebagai berikut:

1. Misi 1

Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber daya air

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan dengan 1 (satu) indikator tujuan dengan capaian sebesar 101,47% termasuk kategori kinerja sangat tinggi. Data capaian kinerja tujuan misi 1 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bina Marga, Sumberdaya Air, Perumahan-Pemukiman, dan Perhubungan

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	Persentase infrastruktur Kondisi Baik	%	76,89	78,02	101,47	85,55	91,20

b. Sasaran

b.1. Meningkatnya Kualitas Jalan-Jembatan, Sarana Drainase Perkotaan, dan Jaringan Irigasi.

Hasil pengukuran kinerja sasaran kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi ditentukan 3 (tiga) indikator yang rata-rata capaiannya sebesar 109,03% yang dikategorikan kinerja sangat tinggi. Data capaian kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan-Jembatan, Sarana Drainase Perkotaan, dan Jaringan Irigasi

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	Persentase jalan-jembatan kondisi baik	%	60,01	72,11	120,16	84,51	85,33
		Cakupan drainase kondisi baik	%	61,00	65,00	106,56	64,00	101,56
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	83,70	84,03	100,39	85,00	98,86
		Rata-rata Capaian				109,04		95,25

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018, realisasi capaian sasaran meningkatnya kualitas jalan-Jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi melalui indikator kinerja jalan-jembatan kondisi baik dari target yang telah ditetapkan sebesar 60,01% telah tercapai sebesar 72,11% (120,16% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi. Sementara itu capaian kinerja indikator cakupan drainase kondisi baik tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 61,00% telah tercapai sebesar 65,00% (106,56% dari target) artinya kinerja sasaran

tersebut berkinerja sangat tinggi. Sedangkan dari capaian kinerja indikator luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik tercapai target yang telah di tetapkan dari target sebesar 83,70% telah tercapai sebesar 84,03% (100,39% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran Meningkatnya kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi didukung dengan program-program:

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
3) Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
4) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
5) Program Pengaturan Jasa Konstruksi
6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
7) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya
8) Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
10) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
11) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 198.884.420.753,00 (Seratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dari anggaran Rp 214.499.565.000,00 (Dua ratus empat belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dari anggaran yang disediakan terealisasi sebesar 92,72%. Realisasi anggaran sebesar 92,72% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 109,04%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam

pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 15.615.144.247,00 (Lima belas milyar enam ratus lima belas juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 7,28%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah sebagai berikut:

1) Persentase jalan-jembatan kondisi baik.

Capaian Kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2018 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 72,11%. Pada program peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan telah dilakukan pemeliharaan terhadap alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Terpeliharanya alat-alat berat yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan dapat menunjang kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan insfrastruktur daerah, karena dengan menggunakan alat-alat berat selain dapat menghemat waktu (tenaga yang besar dan waktu yang singkat) juga dapat menunjang nilai-nilai ekonomis dalam pembangunan. Penggunaan alat berat yang kurang tepat dengan kondisi dan situasi lapangan pekerjaan akan berpengaruh berupa kerugian antara lain rendahnya produksi, tidak tercapainya jadwal atau target yang telah ditentukan atau kerugian biaya perbaikan yang tidak semestinya. Selain itu juga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa utamanya kegiatan pekerjaan infrastuktur jalan dan jembatan.

2) Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

Salah satu sektor yang menjadi komoditi utama Kabupaten Grobogan adalah sektor pertanian. Untuk menunjang sektor pertanian di Kabupaten Grobogan telah dilakukan upaya-upaya antara lain dengan peningkatan pelayanan irigasi.

Adapun tujuan peningkatan pelayanan irigasi adalah untuk membasahi tanah berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah sehingga dapat dicapai suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yang ada di tanah tersebut. Namun secara tidak langsung irigasi mempunyai tujuan yang meliputi mengatur suhu dari tanah, mencuci tanah yang mengandung racun, mengangkut bahan pupuk dengan melalui aliran air yang ada, menaikkan muka air tanah, meningkatkan elevasi suatu daerah dengan cara mengalirkan air dan mengendapkan lumpur yang terbawa air, dan lain sebagainya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan irigasi, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melakukan beberapa program dan kegiatan. Dalam Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, pemberdayaan petani pemakai air, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta peningkatan pengelolaan irigasi patisipatif. Selain Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya juga ada Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dengan kegiatan pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya. Dengan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian pelayanan irigasi di Kabupaten Grobogan.

Permasalahan dan Solusi :

1) Permasalahan :

a) Secara umum kondisi geografis Kabupaten Grobogan yang merupakan daerah terluas nomor 2 se-Jawa

Tengah dengan 273 Desa dan 7 Keluarahan maka dalam rangka untuk menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat sangat mempengaruhi percepatan dalam pembangunan infrastruktur daerah.

b) Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur tidak selesai sesuai dengan kontrak waktu yang telah dijadwalkan.

c) Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur daerah dan minimnya jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki oleh pengampu masalah pekerjaan umum yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan.

d) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat infrastruktur/fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah.

2) Solusi :

a) Pembangunan yang tidak selesai tepat waktu, diusulkan untuk dilanjutkan melalui penganggaran kembali pada tahun anggaran tahun berikutnya dan apabila faktor yang mengakibatkan adalah penyedia, maka perlu diberikan sanksi yang tegas bila perlu ada proses hukum yang bisa menjerat penyedia/rekanan tersebut.

b) Terkait keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan SDM melalui diklat dan pelatihan serta penambahan SDM.

c) Untuk menumbuhkan rasa sikap kepedulian masyarakat terhadap fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah maka perlu ditanamkan rasa memiliki terhadap daerahnya kepada masyarakat.

b.2. Berkurangnya Kawasan Kumuh, Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum dan Sanitasi

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Sasaran Berkurangnya Kawasan Kumuh, Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum dan Sanitasi

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
2.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	Persentase kawasan kumuh	%	0,027	0,026	103,70	0,00	0,00
		Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	74,50	68,91	92,50	85,00	81,07
		Persentase cakupan pelayanan air minum	%	80,10	78,08	97,48	85,17	91,68
		Rata-rata Capaian				97,89		57,58

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018, realisasi capaian sasaran Berkurangnya Kawasan Kumuh, Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum dan Sanitasi melalui indikator kinerja Persentase kawasan kumuh dari target yang telah di tetapkan sebesar 0,027% telah tercapai sebesar 0,026% (103,70% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi. Sementara itu capaian kinerja indikator Persentase cakupan pelayanan sanitasi tercapai target yang telah di tetapkan dari sebesar 74,50% belum tercapai sebesar 68,91% (92,50% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja tinggi. Sedangkan dari capaian kinerja indikator Persentase cakupan pelayanan air minum tercapai target yang telah ditetapkan dari target sebesar 80,10% telah tercapai sebesar 78,08% (97,48% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja tinggi.

Capaian sasaran berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi didukung dengan program-program:

1) Program Lingkungan Sehat Perumahan
2) Program Penataan Bangunan Gedung
3) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
4) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
5) Program Pendukung Operasional Forum Terpadu Penanggulangan Bencana
6) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
7) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
9) Program Pengembangan Perumahan
10) Program Pengendalian Banjir
11) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
12) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
13) Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
14) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
15) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 78.689.193.253,00 (Tujuh puluh delapan milyar eanam ratus delapan puluh sembilan juta seratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dari anggaran Rp 89.583.798.317,00 (Delapan puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga

ratus tujuh belas rupiah). Dari anggaran yang di sediakan, sehingga terealisasi sebesar 87,84%. Realisasi anggaran sebesar 87,84% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 97,89%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 10.894.605.064,00 (Sepuluh milyar delapan ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus lima ribu enam puluh empat rupiah) atau 12,16%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan adalah sebagai berikut:

1) **Persentase kawasan kumuh.**

   Capaian Kinerja penurunan Persentase kawasan kumuh tahun 2018 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 0,026% (103,70%). Pada program Persentase kawasan kumuh telah dilakukan upaya-upaya pemerintah Kab. Grobogan Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang, Kondisi Bangunan, Kondisi Kependudukan, Vitalitas Ekonomi, Kondisi Prasarana Sarana lingkungan dan Prioritas Penanganan.

2) **Persentase cakupan pelayanan sanitasi.**

   Capaian Kinerja cakupan pelayanan sanitasi tahun 2018 belum mencapai target yang telah ditetapkan (capaian baru sebesar 92,50%). Pada program persentase cakupan pelayanan sanitasi telah dilakukan upaya-upaya pemerintah Kab. Grobogan Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang, Kondisi Bangunan, Kondisi Kependudukan, Vitalitas Ekonomi, Kondisi Prasarana Sarana lingkungan dan Prioritas Penanganan.

3) **Persentase cakupan pelayanan air minum.**

   Berdasarkan tabel di atas menunjukkan capaian kinerja sasaran Persentase cakupan pelayanan air minum tahun 2017 terealisasi sebesar 78,08% (97,48%).

Hal itu dikarenakan telah diupayakan upaya terpadu perbaikan sistem, mulai sumber sampai distribusi. Peningkatan sumber atau mencari sumber baru, bila perlu kerjasama antar kota/kabupaten. Pengendalian RTRW adalah pilihan yang menarik, dimana air yang diselamatkan bias menambah ketersediaan air, tanpa menambah sumber baru. Prosedur sambungan baru yang jelas perlu disusun dan diaplikasikan. Prosedur tersebut harus dipahami oleh internal PDAM dan tersosialisasi ke pelanggan dan calon pelanggan. Diskon biaya sambungan atau pembayaran dengan angsuran juga menjadi alternatif. Peningkatan pelayanan harus terus dilakukan, survei kepuasan pelanggan harus selalu dilakukan dan ditindaklanjuti sebagai ukuran sejauh mana PDAM telah memberikan pelayanan kepada pelanggan. Penagihan tunggakan dan pengembalian kembali sambungan pelanggan yang sudah diputus. Upaya-upaya mencari sumber alternatif pendanaan untuk pengembangan. Perencanaan pengembangan sistem untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dan pertambahan kegiatan.

Permasalahan dan Solusi :

1) Permasalahan :

a) Kondisi fisik bangunan kekumuhannya sangat tinggi kepadatan bangunan 98 unit/ha, dengan jumlah penduduk 392 jiwa dan jarak antar bangunan 0,5 m

b) Kondisi sarana dapat dikatakan cukup terlayani namun harus di tingkatkan, karena belum sepenuhnya dapat terlayani, ada beberapa rumah khususnya rumah yang ada di bantaran sungai membuang limbah ke sungai dan

pelayanan air bersih belum seluruhnya menggunakan PDAM karena paktor kemampuan ekonomi

c) Ruang terbuka sangat terbatas sekalipun ada lahan terbuka dimanfaatkan oleh penduduk sebagai lahan parkir.

d) Keterbatasan sistem penyediaan air minum, mulai dari sumber air, instalasi pengolahan air, sistem transmisi, maupun sistem distribusi. Sering ditemui PDAM yang mengalami kekurangan air baku.

e) Melimpahnya/tersedianya sumber air lain sebagai alternatif sumber air minum selain PDAM. Misal sumur air dangkal mudah dan kualitas air jernih. Hal ini akan membuat minat masyarakat untuk menjadi pelanggan PDAM rendah.

f) Prosedur dan biaya sambungan baru di PDAM. Prosedur yang kurang jelas, membutuhkan waktu lama, dan ketidakjelasan jawaban terkait prosedur sambungan akan mengakibatkan lambatnya peningkatan cakupan pelayanan. Mahalnya biaya sambungan baru juga menjadi salah satu hambatan.

g) Pelayanan PDAM yang kurang balk, dapat menimbulkan kesan negatif di masyarakat, muncul persepsi negatif sehingga masyarakat tidak tertarik untuk berlangganan. Pelanggan aktif pun ada yang mengundurkan diri karena pelayanan yang tidak memuaskan.

h) Pemutusan pelanggan oleh PDAM karena berbagai sebab, misal karena pelangan menunggak.

i) Ketersediaan anggaran PDAM untuk pengembangan sistem baru.

j) Perkembangan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi dengan penambahan sambungan baru,

juga akan menyebabkan penurunan cakupan pelayanan. Suatu sistem kadang sudah ada, tetapi tidak direncanakan dan dilakukan pengembangan. Proyeksi penduduk semestinya diimbangi dengan perencanaan pengernbangan sistem penyediaan air minum.

2) Solusi :

a) Peningkatan pelayanan dan jaringan air limbah serta penyuluhan tentang lingkungan hidup.
b) Peningkatan pelayanan dan jaringan air limbah serta penyuluhan tentang lingkungan hidup
c) Penyediaan tempat pembuangan sampah pada tiap RT/RW.
d) Perbaikan drainase
e) Peningkatan pelayanan PAM
f) Peningkatan pelayanan dan jaringan air limbah serta penyuluhan tentang lingkungan hidup
g) Penyediaan tempat pembuangan sampah pada tiap RT/RW serta rambu PERDA K3 pada pinggir sungai khusnya pada daerah permukiman padat di bantaran sungai Penekanan arus urbanisasi dan program KB Penyuluhan kepada masyarakat tentang IMB.

b.3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	93,00	78,00	83,87	95,00	82,11

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut:

Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan ditandai dengan tersediannya angkutan umum pada jalan yang tersedia. Dari target sebesar 93,00% hanya terealisasi 78,00%, artinya hanya sebesar 83,87% pencapaiannya, sehingga kinerja sasaran tersebut dikategorikan berkinerja tinggi. Kebutuhan angkutan umum sudah jarang diminati masyarakat mengingat sarana transportasi yang lebih praktis dan ekonomis mudah diperoleh yaitu dengan sepeda motor. Hal ini yang menyebabkan pengusaha angkutan enggan untuk mengembangkan bisnisnya pada angkutan.

Capaian sasaran Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi didukung dengan program-program:

1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 860.000.000,00 (Delapan ratus enam puluh juta rupiah) dari anggaran Rp 847.179.450,00 847.179.450,00 (Delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah), sehingga terealisasi sebesar 98,51%. Realisasi anggaran sebesar 98,51% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 83,87%, maka terjadi inefisiensi penggunaan anggaran walaupun untuk menyelesaikan sasaran masih tersisa anggaran sebesar Rp 12.820.550,00 (Dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau 1,49%.

2. Misi 2

Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

a. Tujuan

Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.

Hasil pengukuran kinerja tujuan meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan dianalisis sebagai berikut:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
II.	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	2,64	2,95*)	111,74	3,09	95,47

*) Sumber: Data BPS tahun 2017

Kinerja tujuan meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan dengan target 2,64% terealisasi sebesar 2,95% pada tahun 2017, artinya realisasi pencapaian sebesar 111,74%, sehingga tujuan tersebut dikategorikan kinerja sangat tinggi.

b. Sasaran

b.1. Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
4.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura	%	16,67	30,56	183,32	23,51	129,99
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/th	3,00	2,95	98,33	3,00	98,33
		Pertumbuhan produksi peternakan	%	10,31	10,47	101,55	11,11	94,24
			Rata-rata Capaian			127,73		107,52

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018, realisasi capaian sasaran meningkatnya Produksi Pertanian Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan melalui indikator kinerja Pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura dari target yang telah di tetapkan sebesar 16,67% telah tercapai sebesar 30,56 (183,32% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi.

Sementara itu capaian kinerja indikator Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat tercapai target yang telah di tetapkan dari sebesar 3,00% telah tercapai sebesar 2,95% (98,33% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi.

Sedangkan dari capaian kinerja indikator Pertumbuhan produksi peternakan tercapai target yang telah di tetapkan dari target sebesar 10,31% telah tercapai sebesar 10,47% (101,55% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan didukung dengan program-program :

1) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
6) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
7) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 16.532.039.643,00 (Enam belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dari anggaran Rp 17.899.645.600,00 (Tujuh belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah). Dari anggaran yang di sediakan, sehingga realisasi sebesar 92,36%. Realisasi anggaran sebesar 92,36% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 127,73%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 1.367.605.957,00 (Satu milyar enam ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 7,64%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah sebagai berikut :

1) Pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura.

Capaian kinerja pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura tahun 2018 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 183,32%.

Pada program Pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura di Kabupaten Grobogan telah dilakukan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Peningkatan Produksi Pertanian.

2) **Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat.**

Capaian kinerja pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat tahun 2018 belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 3 %/tahun baru terealisasi sebesar 2,95%/tahun.

Pada program pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Grobogan telah dilakukan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan dan Peningkatan Produksi Perkebunan. Dari target 3%/th, maka kurang tercapai dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yakni sebesar 0,05%.

3) **Pertumbuhan produksi peternakan**.

Capaian Kinerja Pertumbuhan produksi peternakan tahun 2018 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capian sebesar 10,47% dari target sebesar 10,31%.

Pada program Pertumbuhan produksi peternakan di Kabupaten Grobogan telah dilakukan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Permasalahan dan Solusi :

1) **Permasalahan:**

Secara umum pada Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, dan

Peternakan dari realisasi pada tahun 2018 tercapai. Namun pada program produksi tanaman perkebunan rakyat pertumbuhan 3%/th masih belum dapat tercapai sebesar 0,05%/th (98,33 %). Hal ini di karenakan bahwa ada perubahan pola budaya para petani perkebunan beralih menjadi petani sayur mayur. Hal ini dikarena program di bidang pasar daerah khususnya Pasar Agro Holtikultura Kab. Grobogan maju pesat dan sebagai kontribusi sampai daerah di Jawa Tengah bahkan sampai dengan nasional khususnya di pulau jawa. Selain itu juga, Kabupaten Grobogan merupakan daerah penyangga pangan nasional.

2) Solusi :

Pada program produksi tanaman perkebunan rakyat akan dilakukan pembinaan dan sosialisasi serta demplot percontohan tanaman perkebunan rakyat khususnya pada wilayah non irigasi di Kab. Grobogan.

b.2. Meningkatnya produksi perikanan

Sasaran meningkatnya produksi perikanan dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
5.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Kg	2.206.825	2.330.980	105,62	2.587662	90,08

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018, realisasi capaian sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan melalui indikator kinerja Produksi Perikanan Budidaya dari target yang telah di tetapkan sebesar 2.206.825 kg telah

tercapai sebesar 2.330.980 kg (105,62% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran meningkatnya Produksi Perikanan didukung dengan program-program:

1) Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
2) Program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya
3) Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 3.866.279.400,00 (Tiga milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dari anggaran Rp 3.955.400.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Dari anggaran yang disediakan, sehingga realisasi sebesar 97,75%. Realisasi anggaran sebesar 97,75% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 105,62%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 89.120.600,00 (Delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) atau 2,25%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah sebagai berikut :

Capaian kinerja produksi perikanan budi daya tahun 2018 dilakukan optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan, pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya dan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap kepada petani perikanan di Kab. Grobogan.

b.3. Meningkatnya Ketahanan Pangan

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
6.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor PPH	Skor	87,00	84,40	97,01	90,00	90.00

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018, realisasi capaian sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui indikator kinerja Skor PPH dari target yang telah di tetapkan dengan skor 87,00 baru tercapai skor 84,40 (97,01% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut masih berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan didukung dengan program-program:

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 8.087.573.290,00 (Delapan milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga dua ratus Sembilan puluh rupiah) dari anggaran Rp 8.322.481.000,00 (Delapan milyar tiga ratus dus puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Dari anggaran yang di sediakan, sehingga realisasi sebesar 97,18%. Realisasi anggaran sebesar 97,18% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 97,01%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 234.907.710,00 (Dua

ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus sepuluh rupiah) atau 2,82%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah sebagai berikut:

Capaian kinerja meningkatnya ketahanan pangan tahun 2018 masih diperlukan upaya-upaya peningkatan skor PPH sebesar 2,60 point.

Solusi Permasalahan :

Dalam rangka utuk meningkatkan point skor PPH di Kab Grobogan maka akan dilakukan optimalisasi program dan kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Peningkatan Ketahanan Pangan serta pembinaan dan sosialisasi kepada warga masyarakat di lingkungan pemerintah Kab. Grobogan.

3. Misi 3

Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata.

a. Tujuan

Menumbuh kembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.

Pengukutran tujuan menumbuh-kembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Tujuan Menumbuhkembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat di Sektor UMKM, Industri dan Perdagangan, serta Mewujudkan Daya Saing Pariwisata

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
III.	Menumbuh-kembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,41	5,65*)	88,14	6,86	82,36
		Laju Inflasi	%	3,01	4,05*)	65,45	2,71	50,55
	Rata-rata Capian Tujuan					76,80		66,46

*)Sumber: Data BPS tahun 2017

Persentase capaian kinerja tujuan yang didukung kinerja sasran pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi hanya mencapai sebesar 76,80%, bahkan apabila kondisi ini bertahan sampai dengan tahun 2021, maka hanya akan mencapai target sebesar 66,46% saja.

b.1. Sasaran

Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Sasaran perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
7.	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,30	15,00	454,55	3,46	433,53
		Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan	%	91,00	100,00	109,89	94,00	106,38
	Rata-rata capaian					282,22		269,955

Pencapaian kinerja sasaran ini di uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018, sasaran meningkatnya perkembangan industri dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) diukur dengan dukungan indikator Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB dan Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/keuangan. Capaian kedua indiaktor tersebut sebesar 282,22% termasuk kategori kinerj sangat tinggi.

Capaian sasaran di atas didukung dengan program-program:

1) Program Penciptaan Iklim Koperasi, Usaha Mikro, Kecil yang Konduksif
2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil
4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sebesar Rp 1.700.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tersrealisasi sebesar Rp 1.683.927.535,00 (Satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) atau realisasi 99,05%. Realisasi anggaran sebesar 99,05% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 282,22%, maka maka telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar 16.072.465,00 (Enam belas juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) atau 0,95%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah sebagai berikut:

1) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

   Industri di Kabupaten telah berkembang dengan sentra industri baik yang PMA maupun PMDN. Melalui kebijakan meningkatkan investasi dengan mengembangkan potensi perijinan yang lebih mudah dan berbasis online. Disamping itu makin banyaknya pameran dan ajang promosi yang lain di sektor industri UMKM.

2) Persentase UKM/koperasi yang mengakses

Jenis usaha akan memerlukan pemodalan dalam rangka pengembangan usahanya. Dengan perkembangan industri UMKM yang menjanjikan mendorong pihak perbankan untuk memberikan kemudahan dalam menyalurkan kredit pada sektor ini.

b.2. Meningkatnya Kinerja Sektor perdgangan dan Pariwisata

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan dan Pariwisata

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
8.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	22,35	19,72	88,23	23,65	83,38
		Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,84	0,16	19,05	0,93	17,20
Rata-rata capaian						53,64		50,29

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018, sasaran meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata yang diukur dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD menunjukkan rata-rata capian kinerjanya sebesar 53,64%. Hal ini dikategorikan kinerja rendah. Hal ini disebabkan capaian kinerja sektor perdagangan yang hanya mencapai 88,23% dan pariwisata dalam berkontribusi pada PDRB juga sangat rendah yang hanya 19,05%.

Capaian sasaran meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata program-program:

1) Program pengembangan destinasi pariwisata
2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

4) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Anggaran yang dialokasikan untuk menyelesaikan sasaran tersebut sebesar Rp 12.342.773.443,00 (Dua belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 12.018.271.600,00 (Dua belas milyar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau realisasi anggaran sebesar 97,37%. Apabila dibandingan dengan capaian kinerja yang hanya sebesar 53,64%, maka telah terjadi ketidakefisienan dalam pengerahan sumber daya termasuk anggaran, walaupun masih terdapat sisa angggaran sebesar Rp 324.501.843,00 (Tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) atau 2,63%

Faktor yang mempengaruhi kegagalan adalah sebagai berikut:

Sektor perdagangan dan pariwisata di wilayah Kabupaten Grobogan masih memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya. khususnya bidang pariwisata belum ada penyediaan paket-paket wisata yang memungkinkan wisatawan untuk diberikan alternatif pilihan. perdagangan dan pariwisata merupakan paket yang sangat erat dalah berkontribusi terhadap penghasilan masyarakat.

Permasalahan dan Solusi:

1) Permasalahan:

   Permasalahan yang utama adalah belum disediakannya sarana dan prasarana pendukung obyek wisata, diantaranya rumah tinggal, restoran, dan daya tarik prasana yang lain.

2) Solusi:

   Disamping penyediaan sarana dan prasarana perlu media penyebaran informasi destinasi wisata dan even khusus untuk memperkenalkan destinasi wisata Kabupaten Grobogan ke dunia luar.

4. Misi 4

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, kepemudaan, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya.

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

Tabel 3.16
Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,98	68,87*)	99,84	69,91	98,51

*)Sumber: Data BPS tahun 2017

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (aritmatik) dari indeks kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), indeks pengetahuan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (pengeluaran per kapita).

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan tahun 2014 sampai tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel 3.177 berikut:

Tabel 3.17
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014–2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*)
Nilai IPM Kabupaten	67,77	68,05	68,52	68,87	-
Nilai IPM Provinsi	68,78	69,49	69,98	70,52	-

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan
*) data tahun 2018 belum tersedia

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 adalah sebesar 68,87. Angka ini termasuk dalam kelas pembangunan manusia kategori **SEDANG**. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM pada tahun-tahun sebelumnya, IPM di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan. Kebutuhan dasar untuk menciptakan SDM yang dapat bersaing tentunya harus melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Kesehatan dan pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah telah mengamatkan standar pelayanan minimal pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Pengukuran kinerja tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia masih harus diupayakan secara maksimal mengingat capaian kinerja tujuan ini belum mencapai target yang ditetapkan (99,84%).

b. Sasaran

b.1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan.

Tabel 3.18
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
9.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	Rata-rata lama sekolah	tahun	6,95	6,66*)	95,83	7,04	94,60
		Angka harapan lama sekolah	tahun	12,54	12,17*)	97,05	12,82	94,93
	Rata-rata capaian					96,44		94,765

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan tahun 2018, rata-rata capaian kinerjanya tercapai sebesar 96,44% (kinerja sangat tinggi). Adapun kondisi sarana prasarana bidan pendidikan di Kabupaten Grobogan ditunjang data-data sebagai berikut:

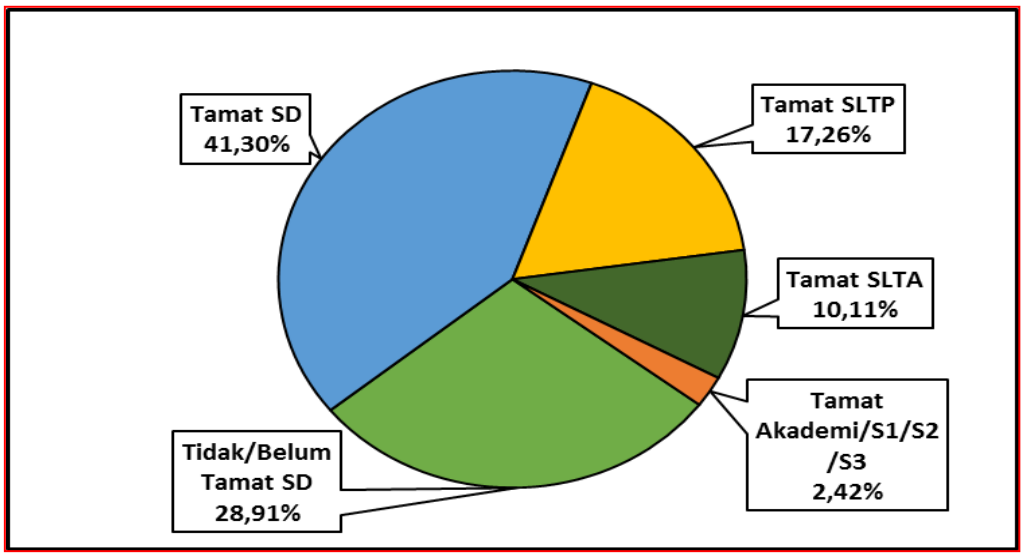
Tabel 3.19
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Tamat SD	422.045	28,91%
2	Tamat SD	602.947	41,30%
3	Tamat SLTP	251.915	17,26%
4	Tamat SLTA	147.545	10,11%
5	Tamat Akademi , S1, S2, S3	35.328	2,42%
	Total	1.459.780	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan data pada tabel 3.20 di atas, komposisi tingkat pendidikan penduduk, tertinggi adalah tamatan SD atau sederajat sebesar 41,30%, kemudian secara berurutan diikuti tidak atau belum tamat SD sebesar 28,91%, tamatan SLTP atau sederajat 17,26%, tamatan SLTA atau sederajat 10,11%, dan terakhir tamatan Diploma, S1, S2, dan S3 sebesar 2,42%.

Lebih jelas dapat dilihat dalam diagram komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditunjukkan dalam gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.2
Diagram Tingkat Pendidikan Penduduk

Untuk mengetahui kinerja bidang pendidikan dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut:

Tabel 3.20
APK dan APM Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1	APK SD	97,66
2	APM SD	91,29
3	APK SLTP	92,60
4	APM SLTP	72,26

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Usia sekolah SD: 7—12 tahun, SLTP: 13—15 tahun.

Dari tabel 3.21 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018, nilai APM SD sebesar 91,29. Ini mengandung makna bahwa sebanyak 91,29 persen anak umur 7 sampai 12 tahun di Kabupaten Grobogan sedang memperoleh pendidikan di tingkat SD.
2. Nilai APM SLTP sebesar 72,26, artinya sebanyak 72,26 persen anak usia 13—15 tahun sedang mengenyam pendidikan SLTP.

Adapun kondisi prasarana pendidikan gedung sekolah, dapat dilihat dalam tabel 3.21 sebagai berikut:

Tabel 3.21
Kondisi Prasarana Gedung Sekolah tahun 2014—2018

No.	Tahun	SD			SLTP		
		RB	RR	B	RB	RR	B
1	2014	683	2.931	1.269	200	958	446
2	2015	291	2.790	1.205	156	915	362
3	2016	943	2.959	1.173	148	1.048	322
4	2017	414	3.107	1.181	96	1.052	356
5	2018	586	3.228	1.241	107	1.054	378

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.
RB: Rusak Berat, RR : Rusak Ringan, B : Bagus

Capaian sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan, didukung dengan program-program:

1) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2) Program Pendidikan Anak Usia Dini
3) Program Pendidikan Non Formal
4) Program pendidikan politik masyarakat
5) Program penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
10) Program Penunjang Pelayanan Pendidikan
11) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Alokasi anggaran pada sasaran ini pada tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 190.919.224.500,00 (Seratus sembilan

puluh milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 174.223.922.879,00 (Seratus sembilan puluh milyar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau can anggarannya sebesar 91,26%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang telah mencapai 96,44%, maka telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dengan sisa anggaran sebesar Rp 6.695.301.621,00 (Enam belas milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) atau 8,74%.

b.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Terkendalinya Jumlah Penduduk

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Terkendalinya Jumlah Penduduk

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
10.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Terkendalinya Jumlah Penduduk	Angka usia harapan hidup	tahun	74,20	74,46*)	100,35	74,44	100,03
		Laju pertumbuhan penduduk	%	0,53	0,67	73,58	0,50	66,00
	Rata-rata capaian					86,97		83,02

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut:

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk dikur dari angka usia harapah hidup dan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018, realisasi

capaian kinerja sasaran ini sebesar 86,97% atau dikategorikan kinerja tinggi.

Capaian sasaran Meningkatnya kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi didukung dengan program-program:

1) Program Bantuan Operasional Kesehatan
2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
5) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
6) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
7) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
8) Program Pengawasan Obat dan Makanan
9) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
10) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
11) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
12) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
13) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
14) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
15) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
16) Program Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga
17) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
18) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Angaran yang dialokasikan untuk mendukung sasaran ini sebesar Rp 374.228.739.966,00 (Tiga ratus tujuh puluh

empat milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), sedangkan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 305.500.580.370,00 (Tiga ratus lima milyar lima ratus juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), jadi realisasinya sebesar 81,63%. Apabila dibandingan antara cpaian anggarannya yang sebesar 81,63% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 86,97%, artinya telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran dengan sisa anggaran sebesar Rp 68.728.159.596,00 (Enam puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 18,37%

Perkembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Grobogan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan menyeluruh yang dekat dengan masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tahun 2018 secara rinci seperti pada tabel 3.23 berikut:

Tabel 3.23
Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Tahun 2018

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	Rumah Sakit	7	7	-	-
2.	Puskesmas	30	18	1	11
3.	Puskesmas Pembantu	69	34	21	14
4.	Klinik	42	42	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

Adapun indikator keberhasilan pembangunan kesehatan dapat diukur dengan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Prevalensi Gizi Buruk Balita. Perkembangan AKB, AKI, AKABA, dan prevalensi gizi

buruk pada balita tahun 2014 sampai tahun 2018 seperti pada tabel 3.24 berikut:

Tabel 3.24
Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Balita dan Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Grobogan
Tahun 2014—2018

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Indikatif				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	AKB/1.000 KH	17,82	17,44	17,22	13,83	14,27
2	AKI/100.000 KH	188,69	149,92	127,19	83,52	152,50
3	AKABA/1.000 KH	19,53	18,99	20,17	15,78	15,54
4	PREVALENSI GIZI BURUK BALITA	0,03	0,04	0,02	0,04	0,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) merupakan banyaknya kematian bayi umur kurang dari 1 tahun (0—12 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka kematian bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan tabel 3.25, AKB di Kabupaten Grobogan tahun 2018 sebesar 14,27/1.000 kelahiran hidup (KH). Dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 13,83/1.000 KH, AKB mengalami kenaikan. Apabila dibandingkan dengan target sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2014—2019 yaitu 24 per 1.000 KH, AKB Kabupaten Grobogan masih di bawah angka tersebut, namun bila dibandingkan indikator Sasaran Strategis Dinas kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang ditargetkan tahun 2018 sebesar 11,00/1.000 KH, AKB di Kabupaten Grobogan telah melampaui target. Demikian juga untuk target sasaran strategis Kabupaten Grobogan 2016—2021 maupun indikator kinerja Renstra Dinas

Kesehatan Kabupaten Grobogan yang masing-masing menargetkan sebesar 12,00/1.000 KH pada tahun 2018.

Angka kematian bayi di Kabupaten Grobogan yang diharapkan semakin turun untuk tiap tahunnya. Namun selama tiga tahun terakhir AKB menunjukkan kecenderungan kenaikan yang signifikan. Hal ini perlu menjadikan prioritas program/kegiatan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan untuk dapat lebih menurunkan AKB yang ada di Kabupaten Grobogan.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu (AKI) dihitung semasa kehamilan, persalinan dan masa nifas yang mempunyai manfaat sebagai gambaran risiko dihadapi oleh ibu selama kehamilan dan melahirkan. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetrik.

Kematian ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola) dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental.

Angka kematian ibu di Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 sebesar 152,5/100.000 kelahiran hidup (KH) (31 kasus). Bila dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 83,52/100.000 KH (18 kasus), angka tersebut juga menunjukkan kenaikan yang cukup berarti. Apabila dibandingkan dengan target sasaran strategis dalam

pembangunan kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2014-2019 yaitu 306/100.000 KH, AKI Kabupaten Grobogan masih dibawah angka. Adapun target Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 116/100.000 KH dan target sasaran strategis Kabupaten Grobogan 2016—2021 maupun indikator kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sebesar 28 kasus telah terlampaui, sehingga memerlukan usaha keras dan dukungan semua pihak untuk menurunkannya. Upaya yang telah ditempuh Dinas Kesehatan diantaranya dengan menentukan kebijakan persalinan di Puskesmas mulai tanggal 1 Januari 2015. Hal ini diharapkan pelaksanaan persalinan dapat dikelola oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai termasuk kesiapan sistem rujukan bila diperlukan dan Rumah Tunggu Kelahiran.

c. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) adalah kematian anak balita (12—59 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita mempunyai manfaat untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan anak balita, mengetahui tingkat pelayanan KIA/posyandu, mengetahui tingkat keberhasilan program KIA/posyandu dan menilai kondisi sanitasi lingkungan.

Angka kematian balita di Kabupaten Grobogan tahun 2018 sebesar 15,54/1.000 KH. Bila dibandingkan tahun 2017 sebesar 15,78/1.000 KH, AKABA di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan. Selanjutnya bila dibandingkan RAD SDGs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar 11,00/1.000 KH, RAD target sasaran strategis Kabupaten Grobogan 2016—2021 maupun indikator kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sebesar 12,00/1.000 KH, maka AKABA di Kabupaten Grobogan telah melampaui target, sehingga perlu upaya yang lebih serius.

d. Gizi Buruk

Pendataan gizi kurang dan gizi buruk didasarkan pada 2 kategori, kategori pertama membandingkan berat badan dengan umurnya (BB/U) dan kategori kedua adalah membandingkan berat badan dengan tinggi badannya (BB/TB).

Skrining pertama dilakukan di Posyandu dengan kategori pertama yaitu membandingkan berat badan dengan umurnya melalui kegiatan penimbangan, jika ditemukan kasus gizi kurang/buruk dilakukan perawatan gizi kurang/buruk sesuai pedoman di Posyandu dan Puskesmas, dilanjutkan dengan skrining berikutnya yaitu dengan membandingkan berat badan dengan tinggi badannya, jika ternyata menderita gizi buruk maka dilakukan perawatan sesuai standar sampai di Rumah Sakit.

Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi penurunan secara fluktuatif. Pada tahun 2016 prevalensi gizi buruk sebesar 0,03%, tahun 2017 sebesar 0,014% dan tahun 2018 sebesar 0,011% yang menunjukkan penurunan.

5. Misi 5

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningatan penyerapan tenaga kerja.

a. Tujuan

Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.

Tabel 3.25
Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Minat dan Realisasi Investasi di Berbagai Sektor Usaha

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	%	5,40	366,21	6.781,67	5,70	6.424,74
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,04	3,02	125,25	3,95	123,54
	Rata-rata capaian					3453,46		3274,14

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut:

Pengukuran indikator tujuan meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha diukur dari pertumbuhan investasi PMA dan PMDN serta tingkat pengangguran terbuka. Capaian kinerja tujuan ini terealisasi sebesar 3.453,46% yang menunjukkan kategori kinerja sangat tinggi. Target petumbuhan investasi tahun 2018 di Kabupaten Grobogan ditargetkan sebesar 5,40%, namun perkembangannya sampai dengan akhir tahun 2018, laju pertumbuhan investasi berkembang sangat pesat.

Keberhasilan tujuan ini karena dukungan regulasi berupa insentif investasi diantaranya kemudahan dalam mengurus perizinan dan dengan melakukan pendampingan terhadap investor di Kabupaten Grobogan. Sosialisasi mengenai kemudahan perizinan dilakukan secara kontinyu. Selain itu secara terus menerus dilakukan promosi investasi baik di tingkat daerah maupun nasional.

b. Sasaran

b.1. Meningkatnya Realisasi Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Tabel 3.26
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
11.	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	Nilai Investasi PMA	Ribu US $	1.250	2.140	171,20	1.250	171,20
		Nilai Investasi PMDN	Juta rupiah	389.486	928.540	238,40	389.486	238,40
	Rata-rata capaian					204,8		204,8

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018, realisasi capaian sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal melalui indikator kinerja Nilai Investasi PMA dari target yang telah di tetapkan sebesar 1.250 Ribu US $ telah tercapai sebesar 2.140 US $ (171,20% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi. Sementara itu capaian kinerja indikator Nilai Investasi PMDN tercapai dari target yang telah di tetapkan sebesar Rp. 389.486.000,- telah tercapai sebesar 928.540.000,- (238,40% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal" didukung dengan program-program :

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
2) Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pedesaan
3) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

4) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
7) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
8) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
9) Program Transmigrasi Lokal

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 4.980.498.028,00 (Empat milyar Sembilan ratus delapan puluh juta empart ratus Sembilan puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah) dari anggaran Rp. 479.065.000,00 (Empat ratus tujuh puluh Sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah). Dari anggaran yang di sediakan, sehingga terealisasi sebesar 99,26%. Realisasi anggaran sebesar 99,26%. dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 99,26%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp. 3.539.521,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) atau 0,74**%**.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah sebagai berikut:

1) Kemudahan investasi
2) Pendampingan investasi
3) Sistem perizinan berbasis online
4) Promosi investasi tingkat nasional .

b.2. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

Tabel 3.27
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
12.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	tahun	70,98	62,25	87,70	72,48	85,89

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018, capaian kinerja sasaran ditargetkan sebesar 70,98% dan terealisasi sebesar 62,25%, sehingga pencapain kinerja sebesar 87,70%. Capaian ini termasuk dalam kategori kinerja tinggi.

Capaian sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja didukung dengan program-program:

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2) Keamanan
3) Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pedesaan
4) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
5) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
8) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
9) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
10) Program Transmigrasi Lokal

Anggaran yang dialikasikan pada sasaran ini sebesar Rp

5.225.640.000,00 (Lima milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 4.980.498.028,00 (Empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah) dengan pencapaian sebesar 95,31%. Apabila dibandingkan kinerja anggaran dan kinerja keuangan, maka kinerja sasaran ini trindikasi tidak efisien dalam mempergunakan suber daya. Namun demian sasaran ini masih menyisakan anggaran sebesar Rp 245.141.972,00 (Dua ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau 4,69%

6. Misi 6

Meningkatkan Kualitas Sunber Daya Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Kualitas Pelayanan Publik.

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Target dan realisasi tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah disajikan pada tabel 3.28 berikut:

Tabel 3.28
Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
VI.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	C*)	100,00	B	33,33

*)Hasil Evaluasi RB Tahun 2017

Selanjutnya tujuan tersebut direalisasikan dengan terwujudnya sasaran meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan

daerah, dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Daerah.

b. Sasaran

b.1. Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN

Tabel 3.29
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kompetensi dan Kedisiplinan ASN

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
13.	Meningkatnya Kompetensi dan Kedisiplinan ASN	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	80,00	68,92	86,15	80,00	86,15

Pencapaian kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan data pada tabel 3.29, diketahui bahwa pencapaian indikator persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi baru mencapai 68,92% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 85,16%. Apabila dibandingkan dengan skala pengukuran kinerja, maka kinerja sasaran termasuk kategori kinerja tinggi, namun capaian tersebut belum memenuhi target kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan sasaran:

Sebagaimana ditetapkan dalam IKU bahwa pejabat yang memenuhi kompetensi jabatan dipenuhi dengan unsur pendidikan, kepangkatan dan kelengkapan pendidikan dan pelatihan dengan perangkat daerah pengampu DKPPD. Kegagalan disebabkan oleh belum maksimalnya jumlah pejabat yang mengikuti diklat kepemimpinan karena keterbatasan sarana diklat yang ada di Kabupaten Grobogan.

Sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
5) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8) Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
9) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
10) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
11) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 70.236.958.125,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp75.945.890.020,00, sehingga realisasinya sebesar 92,48%. Realisasi anggaran sebesar 92,48% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 86,15%, maka terjadi inefisiensi/ketidakefisienan penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Solusi yang dilaksanakan:

Untuk mengatasi kegagalan sasaran meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN yaitu dengan berkoordinasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat mengirimkan pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengikuti diklat kepemipinan di BPSDM Provinsi Jawa Tengah.

b.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Target dan realisasi sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam tabel 3. berikut:

Tabel 3.30
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
14.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP	Skor	CC	CC	114,86	B	95,72
		Opini laporan keuangan BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
		Rata-rata Capaian				107,43		97,86

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Predikat AKIP Kabupaten Grobogan

Pencapaian kinerja sub sasaran nilai SAKIP sebesar 114,86% termasuk kategori kinerja sangat tinggi.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor B/1161/AA.05/2018 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, bahwa Pemerintah Kabapaten Grobogan memperoleh nilai 57,43 atau predikat CC. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Grobogan masih belum

berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang lalu, Kabupaten Grobogan hanya memeperoleh nilai sebesar 52,06, sehingga terjadi peningkatan sebesar 10,31%. Namun demikian Kabupaten Grobogan masih termasuk dalam delapan Kabupaten dengan predikat CC atau peringkat 34 dari 35 Kabupaten/Kota, sehingga masih diperlukan upaya keras dari jajaran Pemerintah Daerah dan semua Perangkat Daerah.

2. Opini Laporan Keuangan BPK

   Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kabupaten pada tahun 2017 dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)". Predikat WTP tersebut telah diperoleh selama kurun waktu tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017, sedangkan hasil audit tahun 2018 belum dikeluarkan hasilnya.

   Dengan demikian capaian indikator kinerja "Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah" tahun 2017 tercapai 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran:

Keberhasilan pencapaian target sasaran ditunjang dengan semakin kuatnya komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menerapkan manajemen kinerja. Perbaikan dokumen SAKIP secara berjenjang mulai dari RPJMD sampai Renstra OPD sehingga tercipta keselarasan, perbaikan IKU Kabupaten maupun OPD, perbaikan PK secara berjenjang dari eselon tertinggi sampai terendah dalam organisasi dengan penyelarasan program dan kegiatan. Selain itu pada tahun 2019

telah mulai digunakan e-SAKIP Grobogan, melakukan *upload* dokumen SAKIP pada masing-masing *website* OPD dan Kabupaten untuk menunjang transparansi akuntabilitas kinerja, serta menjalin komunikasi dan konsultasi dengan Kementerian PAN dan RB melali aplikasi esr.menpan.go.ig.

Adapun dalam pengelolaan keuangan telah diaplikasikan sistem perencaan dan penganggaran berbasis elektronik. Penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan antara lain proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Perencanaan (SIMREN), Sistem Pengeloaan Keuangan Daerah (SIMDA), dan Sistem Monitoring Pembangunan Daerah (SIMONTEP).

Sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

1. Program perencanaan pembangunan daerah
2. Program Pemberian dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
7. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program perencanaan pembangunan daerah
9. Program perencanaan pembangunan ekonomi

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 22.959.878.716,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 25.152.296.230,00 (dua puluh lima milyar seratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah), sehingga realisasinya sebesar 91,28%. Realisasi anggaran sebesar 91,28% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran 107,43%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran sebesar Rp 2.192.417.512,00 (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus dua belas rupiah (8,27%).

b.3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

Target dan realisasi sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah disajikan dalam tabel 3.31 berikut:

Tabel 3.31
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
15.	Meningkatnya kepuasan masyarkat terhadap pelayanan publik Pemda	Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat (SKM)	Skor	76,00	75,06	98.76	79,00	95,01
		Skor PEGI (Pemeringkatan e-*Government* Indonesia)	Skor	2,40	2,80	116,67	3,90	71,79
		Rata-rata Capaian				107,69		83,4

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Rata-rata skor Survei Kepuasan Masyarakat

Pencapaian kinerja kepuasan masyarakat sebesar 75,06% dengan realisasi capaian sebesar 98,76% termasuk kategori kinerja sangat tinggi. Namun demikian skor SKM tersebut masih di bawah target, artinya masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi kenaikan skor tersebut.

Pelaksanaan survei kepuasan tahun 2018 dilaksanakan pada lima OPD pelayanan yaitu RSUD dr. R. Soedjati, Dispendukcapil, DPMPTSP, Disnakertran dan Dinsos. Sedangkan pada tahun 2017 yang lalu, survei dilaksanakan di UPTD Kecamatan Gubug meliputi pertanian, PUPR dan Peternakan dan Perikanan dengan hasil skor sebesar 78,33%.

2. Skor PEGI (Pemeringkatan E-*Goverment* Indonesia)

Pencapaian kinerja sasaran pelaanan publik dengan skor PEGI sebesar 2,80 dari target 2,40, sehingga pencapaian kinerja sebesar 116,67% termasuk kategori kinerja sangat tinggi.

PeGI adalah suatu model yang dibuat oleh Direktorat e-*Government*, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian KOMINFO) yang dapat digunakan sebagai solusi untuk menganalisis *e-Government*. PeGI memiliki lima dimensi assessment yang akan dikaji. Kelima dimensi tersebut adalah kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Masing-masing dimensi tersebut memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran:

Keberhasilan pencapaian target sasaran ditunjang dengan semakin baiknya pelayanan publik di Kabupaten Grobogan, kuatnya komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mengiplementasikan Reformasi Birokrasi. Sedangkan PEGI ditunjang dengan telah diimplementasikannya smart city yang dirintis pada tahaun 2017 yang lalu.

Sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
2. Program kerjasama informasi dengan mas media
3. Program Menunjang Kegiatan Kebangsaan
4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
7. Program Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan di Daerah
8. Program Pengembangan Data Daerah/Desa
9. Program pengembangan data/informasi
10. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
11. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
12. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
13. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
14. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah
15. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
16. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 109.552.931.522,00 (Seratus sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 119.751.472.160,00 (Seratus sembilan belas milyar tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) sehingga realisasinya sebesar 91,48%. Realisasi anggaran sebesar 91,48% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 116,67%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

7. Misi 7

Meningkatkan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang.

a. Tujuan

Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang.

Pengukuran kinerja Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang, dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.32
Target dan Realisasi Tujuan Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
VII.	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,00	74,29	97,75	85,00	87,40

Capaian kinerja tujuan Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang dihitung dengan membandingkan target dan realisasi dari indiktor indeks kualitas lingkungan hidup. Capaian kinerja tujuan ini sebesar 97,75% yang dikategorikan kinerja sangat tinggi sekali.

b. Sasaran

b.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.33
Target dan Realisasi Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
16.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	78,74	78,75	100,01	81,22	96,96
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,18	85,68	99,44	88,90	96,38
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	62,84	62,40	99,30	64,88	96,18
		Rata-rata Capaian				99,58		96,51

Sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup diukur dari rata-rata capaian kinerja indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Rata capian kinerja sebesar 99,58% dan dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan program-program:

Sasaran ini hanya didukung dengan satu program yaitu Program Peningkatan dan Pendendalian Polusi. Anggaran yang dialokasikan pada program ini sebesar Rp 190.000.000,00 (Seratus sembilan puluh milyar rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 182.815.000,00 (Seratus delapan puluh dua milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) stsu sebesar 96,22%. Apabila dibandingkan antara realisasi anggaran sebesar 96,22% dengan

capaian kinerja sebesar 99,58%, artinya terjadi efisiensi penggunaan sumber dana dengan sisa sebesar Rp 7.185.000,00 (Tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 3,78%.

b.2. Meningkatnya Kertersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Terkendalinya Alih Fungsi Lahan

Tabel 3.34
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kertersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Terkendalinya Alih Fungsi Lahan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
17.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	93,72	91,50	97,63	96,12	95,19

Target Sasaran meningkatnya kertersediaan dokumen Rencana Tata Ruang dan Terkendalinya Alih Fungsi Lahan sebesar 93,73% hanya terealisasi sebesar 91,50% atau hanya 97,60% dari target yang telah ditetapkan. Maka masih terdapat target yang tidak dapat tercapai hal ini di karenakan masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran penggunaan fungsi lahan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, apabila kalau dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2021 sebesar 96,12% masih sebesar 4,62% yang masih harus di jadikan skala proiritas sasaran. Dengan demikian, sampai dengan akhir RPJMD untuk Sasaran Meningkatnya Kertersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Terkendalinya Alih Fungsi Lahan akan dapat di capai atau dapat di realisasikan.

Solusi yang akan dilaksanakan dalam pemberian izin Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Grobogan benar-benar dapat disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah tentang RUTRK dan memberikan sangsi tegas bagi yang melanggar dengan mengoptimalkan peran instansi penegak perda. Serta akan di lakukan program yang lebih menyeluruh kepada masyarakat mengenai RUTRK/RDTRK/RTRW agar masyarakat mengetahui zonasi-zonasi daerah masing-masing.

8. Misi 8

Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat.

a. Tujuan

Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kelestarian Budaya Daerah.

Pengukuran tujuan meningkatnya kerukunan antar umat beragama dankelestarian budaya lokal dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 3.35
Target dan Realisasi Tujuan Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kelestarian Budaya Daerah

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
VIII.	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kelestarian Budaya Daerah	Tingkat Kelestarian Budaya Lokal	%	55,00	62,00	112,73	70,00	88,57

Pencapaian kinerja tujuan diukur dengan indikator tingkat kelestarian budaya lokal. Capaian kinerja sebesar 112,73% dikategorikan kinerja sangat tinggi.

b. Sasaran

b.1. Meningkatnya Pemahaman Nilai Keagamaan, Rasa Toleransi, dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
18.	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100,00	100	100	100,00	100

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018, realisasi capaian sasaran Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama dari target yang telah di tetapkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama didukung dengan Program Pengembangan Kehidupan Beragama.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 1.656.474.250,00 (Satu milyar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari anggaran Rp. 1.676.500.000,00 (Satu Milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Dari anggaran yang di sediakan,

sehingga terealisasi sebesar 98,81%. Realisasi anggaran sebesar 98,81% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp. 20.025.750,00 (Dua puluh juta dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 1,19%.

b.2. Lestarinya Budaya Lokal Masyarakat

Tabel 3.37
Target dan Realisasi Sasaran Lestarinya Budaya lokal Masyarakat

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
19.	Lestarinya Budaya lokal Masyarakat	Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan	%	55,00	62,00	112,73	55,00	62,00

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018, realisasi capaian sasaran Lestarinya Budaya lokal Masyarakat dari target yang telah di tetapkan sebesar 55,00% tercapai sebesar 62,00% artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran Lestarinya Budaya lokal Masyarakat didukung dengan Program-program :

1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
3) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
4) Program Pengembangan Nilai Budaya
5) Program perencanaan sosial dan budaya

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 1.749.246.685,00 (Satu milyar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dari

anggaran Rp 1.777.415.000,00 (Satu Milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah). Dari anggaran yang di sediakan, hanya terealisasi sebesar 98,42%. Realisasi anggaran sebesar 98,42% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 112,73%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 28.168.315,00 (Dua puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau 1,58%.

9. Misi 9

Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

a. Tujuan

Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.

Tabel 3.38
Target dan Realisasi Tujuan Menurunnya Kemiskinan, Kesenjangan antar Wilayah, Kesenjangan antar Kelompok Pendapatan, dan Meningkatnya Kesetaraan Gender

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
IX.	Menurunnya Kemiskinan, Kesenjangan antar Wilayah, Kesenjangan antar Kelompok Pendapatan, dan Meningkatnya Kesetaraan Gender	Persentase Penduduk Miskin	%	12,18	12,31	98,93	10,68	84,73
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86,25	85,69	100,65	86,85	98,66
		Indeks Gini	Indeks	0,29	0,35*)	79,31	0,27	70,37
		Indeks Williamson	Indeks	0,17	0,83*)	-288,24	0,15	-353,00

b. Sasaran

b.1. Meningkatnya Perlindungan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel 3.39
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
20.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	66,78	59,27	88,75	78,57	75,44

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, diukur dengan pencapaian indikator penanganan PMKS. Capaian kinerja sebesar 88,75% dikategorikan kinerja tinggi.

Capaian sasaran didukung dengan program-program:

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
3) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
4) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
5) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
6) Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
7) Program Pengentasan Kemiskinan

Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung sasaran ini sebesar Rp 15.577.850.000,00 (Lima belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi Rp 15.547.763.250,00 (Lima belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu

dua ratus lima puluh rupiah). Perbandingan capaian keuangan sebesar 99,81% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 88,75% menunjukkan tidak efisien sasaran tersenbut dalam menggunakan sumber daya, walaupun terjadi sisa sebesar Rp 30.086.750,00 (Tiga puluh juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 0,19%.

b.2. Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak

Tabel 3.40
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
21.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	58,21	56,01	96,22	58,93	95,05
		Skor Kabupaten layak anak	Skor	501-600	687	137,13	801-900	85,77
	Rata-rata Capaian					116,67		90,41

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak, diukur dengan indikator Indeks pemberdayaan gender dan skor kabupaten layak anak. Realisasi capaian kinerjanya sebesar 116,67% menunjukkan kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak didukung dengan program-program:

1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2) Program Pelayanan Keluarga Berencana
3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
4) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

5) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
6) Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
7) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Anggaran yang mendukung sasaran dialokasikan sebesar Rp 3.218.790.000,00 (Tiga milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 3.175.578.000,00 (Tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan capaian sebesar 98,66%. Realisasi anggaran sebesar 98,66% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 116,67% mengindikasikan telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung sasaran tersebut. Adapun efisiensinya sebesar Rp 43.212.000,00 (Empat puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah) atau 1,34%.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisisi efisiensi pencapaian sasaran pembangunan daerah terhadap realisasi anggaran yang dialokasikan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.41
Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis
Tahun 2018

No.	Tujuan/Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Keterangan
I	*Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.*	101,47	304.943.363.317	278.420.793.456	91,30	Efisien
1	Meningkatnya kualitas	109,03%	214.499.565.000	198.884.420.753	92,72%	Efisien

No.	Tujuan/Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Keterangan
	jalan- jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.					
2	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	95,43%	89.583.798.317	78.689.193.253	87,84%	Tidak Efisien
3	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	83,87%	860.000.000	847.179.450	98,51%	Tidak Efisien
II	*Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.*	111,74%	30.177.526.600	28.485.892.333	94,39%	Efisien
4	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	183,32%	17.899.645.600	16.532.039.643	92,36%	Efisien
5	Meningkatnya produksi perikanan	105,62%	3.955.400.000	3.866.279.400	97,75%	Efisien
6	Meningkatnya ketahanan pangan	96,55%	8.322.481.000	8.087.573.290	97,18%	Tidak Efisien
III	*Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.*	76,80%	14.042.773.443	13.702.199.135	97,57%	Tidak Efisien
7	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	282,22%	1.700.000.000	1.683.927.535	99,05%	Efisien
8	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	53,64%	12.342.773.443	12.018.271.600	97,37%	Tidak Efisien
IV	*Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia*	99,84%	565.147.964.466	479.724.503.249	86,45%	Efisien
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	96,44%	190.919.224.500	174.223.922.879	91,26%	Eisienf
10	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	86,97%	374.228.739.966	305.500.580.370	81,63%	Efisien
V	*Meningkatkan minat dan realisasi investasi di*	146,25%	5.704.705.000	5.456.023.507	97,29%	Efisien

No.	Tujuan/Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Keterangan
	berbagai sektor usaha.					
11	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	204,80%	479.065.000	475.525.479	99,26%	Efisien
12	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	87,70%	5.225.640.000	4.980.498.028	95,31%	Tidak Efisien
VI	*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah*	100,43%	220.849.658.410	202.749.768.363	91,75%	Efisien
13	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	86,15%	75.945.890.020	70.236.958.125	92,48%	Tidak Efisien
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	107,43%	25.152.296.230	22.959.878.716	91,28%	Efisien
15	Meningkatnya kepuasan masyarkat terhadap pelayanan publik Pemda	107,72%	119.751.472.160	109.552.931.522	91,48%	Efisien
VII	*Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang*	98,61%	240.000.000	232.565.000	97,86%	Efisien
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	99,58%	190.000.000	182.815.000	96,22%	Efisien
17	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	97,63%	50.000.000	49.750.000	99,50%	Tidak Efisien
VIII	*Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.*	106,37%	3.453.915.000	3.405.720.935	98,60%	Efisien
18	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	100,00%	1.676.500.000	1.656.474.250	98,81%	Efisien
19	Lestarinya budaya lokal masyarakat	112,73%	1.777.415.000	1.749.246.685	98,42%	Efisien
IX	*Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.*	229,9%	18.796.640.000	18.723.341.250	99,61%	Efisien
20	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah	88,75%	15.577.850.000	15.547.763.250	99,81%	Tidak Efisien

No.	Tujuan/Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Keterangan
	kesejahteraan sosial					
21	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	371,05%	3.218.790.000	3.175.578.000	98,66%	Efisien

Berdasarkan data tabel di atas bahwa dari sembilan tujuan, diketahui sebanyak delapan kinerja tujuan (88,89%) yang efisien atau hanya satu kinerja tujuan (1,11%) tidak efisien, sedangkan dari 21 sasaran, diketahui sebanyak 10 kineja sasaran (47,60%) tidak efisien atau 11 kinerja sasaran (52,50%) yang efisien. Melihat capaian tersebut diperlukan evaluasi secara periodik agar semua permasalahan yang mengakibatkan kinerja sasaran tidak efisien dapat segera dideteksi untuk dicarikan solusi pemecahannya.

E. Penghargaan yang Diperoleh Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 dan 2018 telah memperoleh Penghargaan Tingkat Nasional sebanyak 12 (dua belas) penghargaan yaitu sebagai berikut:

1. Penghargaan Nasional sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia.
2. Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015, 2016 dan 2017.
3. Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak kategori pratama
4. Piagam penghargaan kepada RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi dari Kemenpan-RB tanggal 27 November 2018 tentang Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Tahun 2018.

5. Piagam Penghargaan kepada DPMPTSP dari Kemenpan-RB sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Dengan Catatan Tahun 2018.
6. Piagam/penghargaan kepada Dispendukcapil tentang Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Dengan Catatan oleh Kementrian PANRB.
7. Piagam/Penghargaan Sertifikat ISO 9001-2015 dari Badan Sertifikasi Nasional *Quality Regestar System* (QRS) kepada Dispendukcapil.
8. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri kategori TOP BUMD 2018 kepada PD BPR BKK Purwodadi.
9. Penghargaan Nasional dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk kategori *"The Best Contribution 2017" Asset Category* 500 M- 1 Triliyun kepada PD BPR BKK Purwodadi.
10. Penghargaan Nasional dari Infobank tanggal 15 Agustus 2018 kategori BPR *Award* atas Kinerja Keuangan 2013-2017
11. Piagam Sekolah Adiwiyata Nasional 2018, SK Penghargaan Nomor SK.692/MENLH/P2SDM/SDM.2/12/2018 Tgl 2 Desember 2018.
12. Piagam dari Kementerian Pertanian Juara I Nasional Kontes Produk Unggulan Hortikultura Kategori Bawang Merah (Juara I) a.n A.n. Tri Joko Purnomo.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 yang terdiri dari:

1. Tingkat kinerja dari sembilan tujuan, adalah sebagai berikut:
   a. Capaian kinerja >95% kategori "Kinerja Sangat Tinggi"
   b. Capaian kinerja 80% s.d <95% kategori "Kinerja Tinggi" sebanyak 6 sasaran, atau sebesar 28,57%
   c. Capaian kinerja 65 s.d <80% kategori "Kinerja Cukup"
   d. Capaian kinerja 50 s.d <65% kategori "Kinerja Rendah" sebanyak 1 sasaran, atau sebesar 4,76%
   e. Capaian kinerja 0 s.d <50% kategori "Kinerja Sangat
2. Tingkat kinerja dari 21 sasaran, adalah sebagai berikut:
   a. Capaian kinerja >95% kategori "Kinerja Sangat Tinggi" sebanyak 14 sasaran, atau sebesar 66,67%,
   b. Capaian kinerja 80% s.d <95% kategori "Kinerja Tinggi" sebanyak 6 sasaran, atau sebesar 28,57%,
   c. Capaian kinerja 50 s.d <65% kategori "Kinerja Rendah" sebanyak 1 sasaran, atau sebesar 4,76%, sedangkan
   d. Capaian kinerja 65 s.d <80% kategori "Kinerja Cukup" dan kinerja 0 s.d <50% kategori "Kinerja Sangat Rendah masing-masing sebanyak 0 sasaran, atau sebesar 0%.
3. Tingkat efisiensi dari sembilan tujuan, diketahui sebanyak delapan kinerja tujuan (88,89%) yang efisien atau hanya satu kinerja tujuan (1,11%) tidak efisien, dan

4. Tingkat efisiensi dari 21 sasaran, diketahui sebanyak 10 kineja sasaran (47,60%) tidak efisien atau 11 kinerja sasaran (52,50%) yang efisien.

B. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Ispektorat Provinsi Jawa Tengah Nomor 710/814/1.1/2018 tanggal 8 Maret 2018 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Grobogan Tahun 2018 telah memberikan rekomendasi atas evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2017, dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. **Rekomendasi:** Melakukan reviu dan perbaikan penetapan indikator kinerja tujuan dan sasaran sesuai kriteria indikator kinerja yang baik terhadap dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD/Renstra/IKU) untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil menggunakan metode *Cascading*.

   Tindak lanjut:

   - Penyusunan Draft Revisi RPJMD dan Reviu oleh Inspektorat
   - Revisi IKU Kabupaten dan OPD
   - Perbaikan dokumen SAKIP tahun 2017 dan 2018
   - Penyusunan Rencana Aksi
   - Evaluasi SAKIP OPD sebanyak 10 sampel
   - Penyusunan perencanaan dengan Metode *Cascading*

2. **Rekomendasi:** Melakukan perbaikan pemenuhan indikator IKU melalui mekanisme melalui pengumpulan data yang dapat diandalkan, didukung dengan anggaran yang memadai serta dilakukan reviu secara berkala

Tindak lanjut:

- Pemaparan Implementasi SAKIP oleh OPD (kepala OPD) pada momen Cofee Morning Hari Senin Minggu I dan II tiap Bulan secara Acak dihadapan Bupati Grobogan
- Capaian SAKIP OPD diinput dalam e-SAKIP secara periodik (3 bulan).

3. **Rekomendasi:** Melakukan perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja berdasarkan informasi yang dapat diandalkan, untuk dapat menyajikan pencapaian IKU dan perbandingan data yang memadai, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penilaian kinerja

   Tindak lanjut:

   - Laporan Kinerja dilakukan revisi untuk LKjIP tahun 2017
   - LKjIP tahun 2018 yang akan datang disempurnakan sebagai tindak lanjut rekomendasi evaluasi

4. **Rekomendasi:** Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi program agar dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai keberhasilan program

   Tindak lanjut:

   - Hasil evaluasi telah dikomunikasikan
   - Akan dilaksanakan evaluasi penilaian keberhasilan program/kegiatan secara berkala oleh Tim Teknis SAKIP Kabupaten

5. **Rekomendasi:** Pemantauan Rencana Aksi agar dilaksanakan secara berkala hasilnya sebagai dasar untuk perbaikan pelaksanaan program yang ditindaklanjuti dalam langkah nyata

   Tindak lanjut:

   - Pemantauan Rencana Aksi oleh Tim Fasilitasi dan Tim Teknis yang telah ditetapkan oleh Bupati
   - Diagendakan Bulan Januari 2019 sebelum penyusunan LKJiP tahun 2018

C. Keterbatasan Laporan

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2018 yang telah disusun, ditemukan beberapa kelemahan dalam mengukur kinerja, diantaranya:

1. Terjadi distorsi/bias untuk sasaran yang diukur lebih dari satu indikator.
2. Kurang *update*-nya data capaian (BPS tahun 2017), sehingga belum menggambarkan riil kenyataan di lapangan.
3. Indikator yang tidak dibakukan memungkinkan terjadinya beda presepsi, karena defini operasional yang belum lengkap.